

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hakekat otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD.

Kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi kewenangan dan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Namun disamping kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan itu, juga diwajibkan kepada daerah untuk mempertanggungjawabkannya, yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepada DPRD disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan kepada masyarakat disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD).

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan buku Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2014, berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 10);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada garis 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas Provinsi Sumatera Utara mencapai 181.680,68 km², meliputi lautan 110.000 km² atau sekitar 60,5 % dan daratan mencapai 71.680,68 km² atau sekitar 39,5 %. Sebagian besar wilayah daratan berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera.

Sumatera Utara memiliki 419 pulau yang terdiri dari 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatas dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wungu dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 436 kecamatan, dan 6.102 desa/kelurahan. Bila dikelompokkan menurut wilayah geografis, Sumatera Utara terbagi atas 3 kawasan yaitu kawasan Pantai Barat seluas 26.189,07 km², kawasan Dataran Tinggi seluas 20.569,62 km², dan kawasan Pantai Timur seluas 24.921,99 km² (data BPS Tahun 2014).

Kawasan Pantai Barat seluas 26.189,07 km² meliputi 9 kabupaten dan 3 kota yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli.

Kawasan dataran tinggi seluas 20.569,62 km² meliputi 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Kota Pematangsiantar.

Kawasan Pantai Timur seluas 24.921,99 km² meliputi 8 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Medan dan Binjai.

2. Gambaran Umum Demografis

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, mencatat jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2014 sebesar 13.766.852 jiwa dengan penduduk laki-laki adalah 6.868.587 jiwa (49,89%) dan penduduk perempuan sebanyak 6.898.264 jiwa (50,11%). Sebagian besar penduduk berada di Kawasan Pantai Timur yang mencapai 8.573.504 jiwa (62,28%), Kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.567.377 jiwa (18,65%), dan Kawasan Pantai Barat sebanyak 2.625.970 jiwa (19,07%). Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama

kurun waktu sepuluh tahun terakhir 2000 – 2010 mencapai 1,22 % per tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990 – 2000, yang mencapai 1,20 % pertahun.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2014¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan	1.081.797	1.109.343	2.191.140
2	Binjai	130.551	130.939	261.490
3	Pematangsiantar	119.582	125.522	245.104
4	Padangsidempuan	100.642	105.854	206.496
5	Tanjungbalai	83.006	81.669	164.675
6	Tebing Tinggi	76.488	78.316	154.804
7	Gunungsitoli	65.651	68.545	134.196
8	Sibolga	43.280	42.886	86.166
9	Deli Serdang	998.669	985.929	1.984.598
10	Langkat	506.513	499.452	1.005.965
11	Simalungun	420.591	423.442	844.033
12	Asahan	351.415	348.305	699.720
13	Serdang Bedagai	304.403	301.964	606.367
14	Labuhanbatu	229.110	224.520	453.630
15	Mandailing Natal	209.401	216.981	426.382
16	Batu Bara	199.508	196.971	396.479
17	Karo	189.815	192.807	382.622
18	Labuhanbatu Utara	175.405	172.060	347.465
19	Tapanuli Tengah	172.037	170.865	342.902
20	Labuhanbatu Selatan	156.578	150.593	307.171
21	Nias Selatan	151.380	153.630	305.010
22	Tapanuli Utara	143.794	147.070	290.864
23	Dairi	138.608	138.967	277.575
24	Tapanuli Selatan	135.707	137.425	273.132
25	Padang Lawas	126.313	125.614	251.927
26	Padang Lawas Utara	124.229	123.057	247.286
27	Humbang Hasundutan	89.906	91.120	181.026
28	Tobasamosir	88.680	89.888	178.568
29	Nias	65.933	69.386	135.319
30	Nias Utara	65.705	67.030	132.735

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
31	Samosir	61.080	61.985	123.065
32	Nias Barat	40.375	44.044	84.419
33	Pakpak Bharat	22.435	22.085	44.520
Sumatera Utara		6.868.587	6.898.264	13.766.851

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Sebaran penduduk terbesar berada di Kota Medan yang mencapai 2.191.140 jiwa (15,92%) disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 1.984.598 jiwa (14,42%), Kabupaten Langkat sebanyak 1.005.965 jiwa (7,31%), Kabupaten Simalungun sebanyak 844.033 jiwa (6,13%), Kabupaten Asahan sebanyak 699.720 jiwa (5,08%) dan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 606.367 jiwa (4,40%). Sebaran penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat 44.520 jiwa (0,32%), Kabupaten Nias Barat 84.419 jiwa (0,61%), Kota Sibolga 86.166 jiwa (0,63 %), Kabupaten Samosir 123.065 jiwa (0,89%), Kabupaten Nias Utara 132.735 jiwa (0,96%) dan Kota Gunungsitoli 134.196 jiwa (0,97%). Sedangkan sebaran penduduk yang berada di 21 kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 4 %.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
1	Medan	2.191.140	8.265	15,92
2	Binjai	261.490	2.898	1,90
3	Pematangsiantar	245.104	3.065	1,78
4	Padangsidempuan	206.496	1.801	1,50
5	Tanjungbalai	164.675	2.677	1,20
6	Tebing Tinggi	154.804	4.027	1,12
7	Gunungsitoli	134.196	286	0,97
8	Sibolga	86.166	8.001	0,63

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (org/km ²)	Distribusi (%)
9	Deli Serdang	1.984.598	798	14,42
10	Langkat	1.005.965	161	7,31
11	Simalungun	844.033	193	6,13
12	Asahan	699.720	190	5,08
13	Serdang Bedagai	606.367	317	4,40
14	Labuhanbatu	453.630	177	3,30
15	Mandailing Natal	426.382	64	3,10
16	Batu Bara	396.479	438	2,88
17	Karo	382.622	180	2,78
18	Labuhanbatu Utara	347.465	98	2,52
19	Tapanuli Tengah	342.902	159	2,49
20	Labuhanbatu Selatan	307.171	99	2,23
21	Nias Selatan	305.010	188	2,22
22	Tapanuli Utara	290.864	77	2,11
23	Dairi	277.575	144	2,02
24	Tapanuli Selatan	273.132	63	1,98
25	Padang Lawas	251.927	65	1,83
26	Padang Lawas Utara	247.286	63	1,80
27	Humbang Hasundutan	181.026	79	1,31
28	Tobasamosir	178.568	76	1,30
29	Nias	135.319	138	0,98
30	Nias Utara	132.735	88	0,96
31	Samosir	123.065	51	0,89
32	Nias Barat	84.419	155	0,61
33	Pakpak Bharat	44.520	37	0,32
Sumatera Utara		13.766.851	192	100,00

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 71.680,68 km² kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai 192 jiwa per km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan sebesar 8.265 jiwa per km² disusul oleh Kota Sibolga sebesar 8.001 jiwa per km², Kota Tebing Tinggi sebesar 4.027 jiwa per km², Kota Pematangsiantar sebesar 3.065 jiwa per km², Kota Binjai sebesar 2.898 jiwa per km², Kota Tanjungbalai sebesar

2.677 jiwa per km² dan Kota Padangsidempuan sebesar 1.801 jiwa per km².

Kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat 37 jiwa per km², Kabupaten Samosir 51 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan 63 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara 63 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal 64 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas 65 jiwa per km², Kabupaten Toba Samosir 76 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara 77 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan 79 jiwa per km², Kabupaten Nias Utara 88 jiwa per km², Kabupaten Labuhanbatu Utara 98 jiwa per km², dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 99 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2014¹⁾

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0- 4	802.375	773.870	1.576.245	103,68
5- 9	759.810	721.943	1.481.753	105,25
10-14	704.663	673.408	1.378.071	104,64
15-19	672.488	648.926	1.321.414	103,63
20-24	600.170	592.525	1.192.695	101,29
25-29	549.776	547.230	1.097.006	100,47
30-34	510.973	519.057	1.030.030	98,44
35-39	472.924	479.688	952.612	98,59
40-44	428.251	439.488	867.739	97,44
45-49	378.235	395.276	773.511	95,69
50-54	324.230	341.124	665.354	95,05
55-59	259.826	270.385	530.211	96,09
60-64	174.601	184.592	359.193	94,59
65-69	102.076	123.445	225.521	82,69
70-74	67.452	89.412	156.864	75,44
75+	60.737	97.895	158.632	62,04
TOTAL	6.868.587	6.898.264	13.766.851	99,57

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Sensus Penduduk 2010

3. Gambaran Umum Perekonomian

3.1 Potensi Unggulan

a. Sumber Energi

Berbagai kebijakan energi yang diterapkan dalam rangka pengelolaan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, rasional, optimal dan terpadu adalah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi saat ini energi telah berubah menjadi suatu hal yang sangat mendesak dan kondisi ini telah mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Energi (khususnya fosil) masih diperlakukan sebagai komoditi dagang yang memberikan nilai tambah yang rendah.
- 2) Tidak mencukupinya pasokan energi untuk kebutuhan energi domestik, namun produksi energi diekspor dalam jumlah yang besar.
- 3) Pemanfaatan energi tidak efisien.
- 4) Harga energi belum memenuhi harga keekonomian.
- 5) Iklim investasi energi masih rendah.
- 6) Kapasitas industri energi nasional masih rendah.
- 7) Terbatasnya akses masyarakat terhadap energi.

Potensi energi berupa panas bumi sebagai energi alternatif yang tersebar pada beberapa tempat di Sumatera Utara, diantaranya di Kabupaten Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal.

Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik Sumatera Utara.

Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota penghasil minyak dan gas yang ada di Sumatera Utara, yaitu : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi Lifting Minyak Bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel, dengan potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2014 sebesar 46.431,88 MSTB.

Potensi/cadangan gas bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari potensi/cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF, potensi/cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan potensi/ cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF, sedangkan untuk realisasi Lifting Gas Bumi pada tahun 2013 sebesar 3.888,1 MMBTU dan pada tahun 2014 sebesar 4.822,4 MMBTU.

Tabel 1.4
Potensi Gas Bumi Tahun 2014

Kabupaten	Cadangan (MMSCF)* Gas		
	Terbukti	Mungkin	Harapan
Langkat	233.591	54.797	25.893
Deli Serdang	143.065	0	0
Binjai	37.810	0	0
Medan	3.933	1.681	1.449
Offshore Medan - Langkat	54.000	0	0
Total	472.399	56.478	27.342

Ket : *MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta Kaki Kubik

Sumber : Bappeda Provu

Cadangan batubara terdapat di 15 titik dan gambut yang merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, juga dapat digunakan sebagai media semai. Timah putih merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi. Sebaran lokasi potensi di Sumatera Utara berada pada Aekhabil Kecamatan Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada 1°45'03,3" LU 99°08'11,2" BT dengan jumlah cadangan sebesar 470 BSCF (*Billion Standard Cubic Feet*) dan Desa Hatapang Kecamatan Na-IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Serta beberapa wilayah lain yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, Padang Lawas, Labuhanbatu Utara, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli dimana hingga saat ini dalam tahap Penyelidikan Umum. Terdapat juga indikasi potensi energi nuklir (radioaktif) yang terdapat di Kelurahan Aekhabil Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

- b. Bahan Tambang Mineral Logam dan Bukan Logam
- Provinsi Sumatera Utara mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam, emas, timah hitam (galena), seng, tembaga, besi dan mineral non logam : batugamping, dolomit, bentonit, zeolit, kaolin, feldspar, marmar, granit, belerang, andesit, serpentin, pasir kwarsa, perlit serta bahan galian energi : gambut, batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan

geologi (perkiraan) dan mutu sumberdaya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti).

Tabel 1.5
Potensi Bahan Galian Unggulan di Sumatera Utara

No	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Batu Apung	Sitilupu	Pahae Jae	Tapanuli Utara	Cadangan hipotetik = 120.000 Ton
		Huta Tinggi	Parmonangan	Tapanuli Utara	Cadangan hipotetik = 240.000 Ton
		Tiga juhar	STM Hilir	Deli Serdang	Cadangan hipotetik = 5.727.960 Ton
2	Belering	Sibanggor Tonga	Kotanopan	Madina	Cadangan hipotetik = 220.000 Ton. Hasil analisa = S = 86,72%
		Namora Ilangit	P. Julu	Taput	Cadangan = hipotetik 106.000 Ton
		Gn. Pusuk Buhit	Pangururan	Samosir	Cadangan hipotetik = 33.000 Ton
		Banuaji	Adian Koting	Taput	
		Gn. Sibayak	Sp. Empat	Karo	Cadangan hipotetik = 54.789 Ton
		Gn. Sinabung	Payung	Karo	
3	Bentonit	Pt. Padang	Sosopan	Tapsel	Cadangan hipotetik = 200.000 Ton
		Hasahatan	Sipirok	Tapsel	Cadangan hipotetik = 2.000.000 Ton
		S. Tapus	Saipar Dolok Hole	Tapsel	
		P. Brandan	Babalan	Langkat	

No	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
		Wonosari	Besitang	Langkat	Cadangan hipotetik = 78.000.000 Ton Hasil analisa :SiO ₂ = 8,64%, Al ₂ O ₃ = 9,18%, CaO = 69,13%,MgO = 5,91%, Fe ₂ O ₃ = 4,01%
4	Dolomit	Lau Buluh	Kuta Buluh	Karo	Hasil analisa :CaO = 25,75-34,98%, MgO = 11,90-21,97%,SiO ₂ = 0,14-3,86%, Al ₂ O ₃ = 0,20-0,89%
		Kempawa	Tanah Pinem	Dairi	Hasil analisa :CaO = 34,99%, MgO = 20,31%, Na ₂ O = 0,05%, K ₂ O = 0,2%, Al ₂ O ₃ = 0,07%
		Kutakepar	Payung	Karo	Cadangan hipotetik : 11.520.000 Ton. Hasil analisa : MgO = 21,76 – 22,17%
		Simasom	Pahae Julu	Taput	
5	Granit	Parombuanan	Sibolga	Tapteng	Cadangan hipotetik : 600.000.000 Ton Hasil analisa : daya serap air = 0,47%, BD = 2,66 berat isi = 2,63 Gr/cm ³ , Aus gesek = 50,14%, Kuat Tekan = 1150,54 Kg/cm ²
		Raut Bosi	Pangaribuan	Taput	Cadangan hipotetik : 1.715.800 Ton
		Muara Sipongi	M. sipongi	Madina	
		Aek Banir	Panyabungan	Madina	
		Hatapang	IX Na X	Lab. Batu	
6	Kaolin	S. Tonga	Kotanopan	Madina	Cadangan hipotetik : 366.163 Ton Hasil analisa :SiO ₂ = 40,34-57,64%, Al ₂ O ₃ =15,52-

No	Bahan Galian	Lokasi			Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
					23,75%, Fe ₂ O ₃ =1,00-1,55%, CaO=2,55-5,09%, TiO ₂ =LOI=49,31-53,13%
		Purbatua	Sipirok	Tapsel	Hasil analisa : SiO ₂ = 40,34-61,58%, Al ₂ O ₃ =21,55-31,64%, Fe ₂ O ₃ =1,00-1,55%, TiO ₂ =0,53%
		Bulu Payung	Sipirok	Tapsel	Hasil analisa : SiO ₂ = 40,34-60,58%, Al ₂ O ₃ =29,93-31,64%, Fe ₂ O ₃ =1,00-1,58%, TiO ₂ =0,53%
			Barus	Tapteng	Hasil analisa : SiO ₂ = 73,32%, Al ₂ O ₃ =13,24%, Fe ₂ O ₃ =2%, LOI=6,39%
		Pantis	Pahae Jae	Tapteng	
		Pearaja	Tarutung	Taput	
7	Marmer	Aek Banir	Panyabungan	Madina	Hasil analisa : SiO ₂ = 0,04-26,34%, CaO=23,55-54,68%, Fe ₂ O ₃ =0,16-9,18%, MgO=0,60-5,65%, LOI = 9,41-43,30%
		Muara pungkut	Kotanopan	Madina	
		Ranjo batu	Muara sipongi	Madina	
		Sibaganding	GSP Bolon	Simalungun	
		Mardinding	Mardinding	Karo	
		Mbal petarum	Lau baleng	Karo	
		Lau buluh	Kutabuluh	Karo	1,552.233 M ³ Hipotetik
		Kuta buluh	Tanah pinem	Dairi	
8	Toseki	Hutatinggi	Parmonangan	Humbang hasudutan	36.000.000 M ³ Hipotetik

Sumber : Bappeda Provsu

c. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai

Kondisi hidrologi di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 71 DAS dan 3 (tiga) DAS lintas provinsi. Jumlah induk sungai di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 99 buah, Anak Sungai sebanyak 783 buah, Ranting Sungai 659 buah, anak Ranting Sungai 342 buah.

2) Sungai, Danau dan Rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 satuan Wilayah Sungai (WS) berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan. WS Lintas Provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas Provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumon – Kualuh adalah, WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas kabupaten/kota.

Kawasan rawa merupakan sumber daya alam yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Luas baku daerah rawa di Sumatera Utara sebesar 1.012.005 Ha

yang letaknya tersebar di kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.

3) Debit Air

Beberapa sungai utama di Provinsi Sumatera Utara memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Wampu, Sungai Ular, Sungai Barumon, Sungai Silau, Sungai Asahan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih dan air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu.

Selain itu terdapat badan air yaitu danau dengan debit air cukup besar yang potensial bagi sistem pengairan dan memiliki air terjun yang potensial sebagai sumber energi. Badan air berupa danau kecil yaitu Danau Siais dan Danau Pandan di Tapanuli Tengah, Danau Balimbing di Tapanuli Selatan, Danau Lau Kawar di Kabupaten Karo dan yang terbesar yaitu Danau Toba yang terletak di dataran tinggi di wilayah tengah meliputi 7 (tujuh) kabupaten dengan luas 110.260 ha. Di Pulau Samosir terdapat dua danau kecil yaitu Danau Sidihoni dan Danau Aek Tonang.

Juga terdapat potensi air tanah dimana empat diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi.

d. Klimatologi

1) Tipe

Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

2) Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm per tahun atau rata-rata 2.100 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 - 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai bulan Maret.

3) Suhu

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80°C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40°C.

4) Kelembaban

Kelembaban udara rata-rata 78%-91%.

e. Penggunaan Lahan

1) Kawasan lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.055.795,00 ha atau 42,63 % dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068,00 ha).

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

- Fungsi hutan dalam kawasan lindung (1.633.889,00 ha) :

a) Kawasan Suaka Alam (KSA)/ : 427.008,00 Ha
Kawasan Pelestarian Alam
(KPA)/Taman Buru (TB)

b) Hutan Lindung (HL) : 1.206.881,00 Ha

- Fungsi hutan dalam kawasan budidaya (1.421.905,00 ha)
 - a) Hutan Produksi Terbatas (HPT) : 641.769,00 Ha
 - b) Hutan Produksi Tetap (HP) : 704.452,00 Ha
 - c) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) : 75.684,00 Ha

Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung adalah kawasan yang berada pada ketinggian 2.000 meter d.p.l. dengan kelerengan lebih besar dari sekitar 45%, mempunyai skor lebih dari 175 menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980, mempunyai jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol dan rezina) dan kelas lereng lebih besar dari 15 %, bercurah hujan tinggi dan mampu meresapkan air ke dalam tanah, termasuk di dalamnya kawasan tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/ rawa dan yang ditetapkan sebagai hutan lindung. Kawasan ini mencakup juga lahan gambut di Kabupaten Langkat, Humbang Hasundutan, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, dan Nias).

2) Kawasan budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian yang teridentifikasi hingga Tahun 2012 seluas 380.201 Ha. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian meliputi

areal seluas lebih kurang 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah merupakan wilayah yang subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan juga relatif tinggi, meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi. Kegiatan di wilayah ini umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga, wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Komoditi bidang pertanian pada dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi,

ikan mas, sapi, bawang merah sangat berpotensi untuk dikembangkan. Untuk perkebunan, luas areal perkebunan rakyat sampai tahun 2013 adalah sekitar 1,1 juta Ha, dengan total produksi sebesar \pm 5,9 juta ton dengan komoditi kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tembakau, kelapa dan komoditi lainnya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan, dengan luas laut 110.000 Km² dan panjang pantai 1.300 Km meliputi Pantai Timur (WPP 571) sepanjang 545 Km dan Pantai Barat, Nias, Pulau-Pulau Batu (WPP572) sepanjang 755 Km. Potensi perikanan tangkap sebesar 841.200 ton/tahun terdiri dari potensi perikanan tangkap di WPP 571 Selat Malaka (Pantai Timur) sebanyak 276.00 ton/tahun dan WPP 572 Samudera Hindia (Pantai Barat) sebanyak 565.200 ton/tahun serta penangkapan di perairan umum sebesar 155.797 hektar. Potensi perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut seluas 100.000 hektar, budidaya air tawar seluas 18.647,5 hektar dan air payau seluas 20.000 ha

Potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara meliputi pariwisata alam (kawasan Danau Toba, Berastagi, kawasan ekosistem Gunung Leuser dan Bukit Lawang Bahorok, Sibolangit, pantai di Kepulauan Nias, dan lain-lain), pariwisata budaya (Istana Maimun, kediaman Chong A Fie, makam Sisingamangaraja XII, peninggalan megalit di Pulau Nias, dan lain-lain) dan pariwisata minat khusus (Arung Jeram Sei Asahan, Taman Iman, Paralayang di Sitopis, dan lain-lain).

f. Ketahanan Pangan

Terkait dengan ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) produksi padi tahun 2013 di Sumatera Utara sebesar 3.727.680 ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 12.166 ton dibanding produksi tahun 2012 sebesar 3.715.514 ton GKG. Walaupun dari sisi luas lahan terjadi penurunan dari 765.099 hektar pada tahun 2012 menjadi 742.968 hektar pada tahun 2013 akan tetapi untuk produktivitas padi mengalami peningkatan dari 48,56Kw/Ha tahun 2012 menjadi 50,17Kw/Ha pada tahun 2013.

Angka Ramalan II (ARAM II) produksi padi tahun 2014 sebesar 3.604.602 ton GKG, mengalami penurunan sebesar 123.078 ton GKG dibanding produksi ATAP tahun 2013 sebesar 3.727.680 ton GKG. Kondisi ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2013 dimana produksi dan luas panen mengalami penurunan akan tetapi untuk produktivitas mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya usaha intensifikasi dengan berbagai upaya dalam rangka peningkatan produktivitas seiring dengan sulitnya melakukan ekstensifikasi luas lahan pertanian walaupun ada upaya dengan melakukan perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan.

Tabel 1.6
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
di Sumatera Utara Tahun 2010-2014

Komoditas	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	ARAM II 2014*)
Padi	Luas Panen	Ha	754.674	757.547	765.099	742.968	713.254
	Produktivitas	Kw/Ha	47,47	47,62	48,56	50,17	50,54
	Produksi ¹⁾	Ton	3.582.302	3.607.403	3 715 514	3.727.680	3.604.602
Padi Sawah	Luas Panen	Ha	702.308	703.168	714.307	697.344	NA
	Produktivitas	Kw/Ha	48,73	48,93	49,73	51,21	NA
	Produksi ¹⁾	Ton	3.422.264	3.440.262	3.552.373	3.571.141	NA
Padi Ladang	Luas Panen	Ha	52.366	54.379	50.792	45.624	NA
	Produktivitas	Kw/Ha	30,56	30,74	32,12	34,31	NA
	Produksi ¹⁾	Ton	160.038	167.141	163.140	45.624	NA
Jagung	Luas Panen	Ha	274.822	255.291	243.098	211.750	199.337
	Produktivitas	Kw/Ha	50,13	50,71	55,41	55,86	56,02
	Produksi ²⁾	Ton	1.377.718	1.294.645	1.347.124	1.182.928	1.116.649
Kedelai	Luas Panen	Ha	7.803	11.413	5.475	3.126	4.363
	Produktivitas	Kw/Ha	12,10	10,01	9,90	10,33	10,73
	Produksi ³⁾	Ton	9.439	11.426	5.419	3.126	4.680
Kacang Tanah	Luas Panen	Ha	14.520	10.773	10.154	9.377	8.344
	Produktivitas	Kw/Ha	11,33	10,30	11,89	12,11	11,93
	Produksi ³⁾	Ton	16.449	11.093	12.074	11.352	9.952
Kacang Hijau	Luas Panen	Ha	3.110	3.004	3.498	2.130	2.508
	Produktivitas	Kw/Ha	10,76	10,82	10,91	11,01	11,1
	Produksi ³⁾	Ton	3.345	3.250	3.817	2.345	2.783
Ubi Kayu	Luas Panen	Ha	32.402	37.929	38.749	47.141	43.134
	Produktivitas	Kw/Ha	279,48	287,83	302,34	322,06	329,36
	Produksi ⁴⁾	Ton	905.571	1.091.711	1.171.520	1.518.221	1.420.658
Ubi Jalar	Luas Panen	Ha	14.874	15.466	14.595	9.101	10.128
	Produktivitas	Kw/Ha	120,61	123,56	127,84	128,19	131,01
	Produksi ⁴⁾	Ton	179.388	191.104	186.583	116.670	132.687

Sumber : BPS Provsu

Keterangan : 1) = bentuk hasil Gabah Kering Giling (GKG)

2) = bentuk hasil pipilan kering

3) = bentuk hasil biji kering

4) = bentuk hasil umbi basah

Produksi peternakan dan perikanan dapat digambarkan sebagai berikut : peternakan, terdiri dari ternak kecil (kambing, domba, babi), ternak besar kuda, sapi, kerbau dan unggas (ayam ras, ayam kampung, itik manila). Produksi daging ternak besar pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012 untuk semua jenis ternak, sedangkan produksi daging pada ternak kecil pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 untuk semua jenis ternak. Tahun 2014 produksi daging mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 untuk semua jenis ternak. Produksi telur terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2014.

Produksi ikan Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 770.540,47 ton terdiri atas 515.325 ton ikan laut, 50.471,27 ikan perairan umum dan 204.744,2 perikanan darat. Produksi tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 756.922,3 ton, yang terdiri atas 510.551,6 ton ikan laut, 52.580,7 ton ikan perairan umum dan 193.790,00 ton perikanan darat.

Tabel 1.7
Produksi Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014 (Ton)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Kuda	98,98	101,45	100.02	56.79	62.41
2	Sapi	15.707,60	18.299,60	24,546.60	18,436.60	25,695.67
3	Kerbau	6.191,89	4.942,37	7,307.89	3,395.12	7,759.88
4	Kambing	3.188,99	3.268,71	3,352.55	3,469.81	3,556.55
5	Domba	1.549,87	1.588,58	1,706.98	1,852.71	1,901.62
6	Babi	35.206,21	35.786,36	38,221.38	39,211.68	39,584.19
7	Unggas	66.536,18	67.056,96	60,393.01	69,427.20	72.785.40
8	Telur	92.832,87	104.939,74	131,261.33	164,977.21	176,193.09

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (SUDA 2013-2014)

Keterangan : *) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provsu, 2015

Tabel 1.8
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Laut	363.158,30	363.158,30	549.479,40	510.551,60	515.325
2	Perairan Umum	17.494,10	23.131,50	24.491,90	52.580,70	50.471,27
3	Darat	118.942,91	118.942,91	NA	193.790,00	204.744,2

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara (SUDA 2013-2014)

Keterangan : *) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 2015

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Secara makro kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014 mencapai 5,23 % melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 % pada tahun yang sama.

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2010 Tahun 2011-2014 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Tahun			
	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,88	5,31	4,71	4,37
B. Pertambangan & Penggalian	10,72	11,95	26,03	5,33
C. Industri Pengolahan	3,22	5,64	4,84	2,97
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	13,87	-3,03	-3,88	3,71
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,30	5,13	5,68	6,04
F. Konstruksi	8,46	6,67	7,66	6,79
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,13	7,91	5,57	6,94
H. Transportasi dan Pergudangan	10,24	8,25	7,41	5,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,52	6,75	7,81	6,48

Lapangan Usaha/ Kategori	Tahun			
	2011	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
J. Informasi dan Komunikasi	9,96	8,79	7,78	7,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,71	10,09	9,99	2,84
L. Real Estate	9,66	6,96	6,94	6,59
M,N. Jasa Perusahaan	10,68	6,04	6,68	6,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,93	2,53	3,34	6,92
P. Jasa Pendidikan	4,79	4,94	8,34	6,37
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	16,00	10,58	10,82	7,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,00	7,83	7,45	7,04
PDRB	6,66	6,45	6,08	5,23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun 2013, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami peningkatan sebesar 5,23%. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan positif pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,23% dibanding dengan lapangan usaha lainnya. Disusul oleh lapangan usaha jasa lainnya 7,04%, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,00%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 6,94%, lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 6,92%, lapangan usaha konstruksi 6,79%, lapangan usaha jasa perusahaan 6,76%, lapangan usaha *real state* 6,59%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 6,48 persen, lapangan usaha jasa pendidikan 6,37%, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang 6,04%,

lapangan usaha transportasi dan pergudangan 5,71%, lapangan usaha pertambangan dan penggalian 5,33% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 4,37%. Sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 4%.

Tabel 1.10
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2013-2014 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115.194,75	121.435,44	99.899,57	104.269,61
B. Pertambangan & Penggalian	6.581,44	6.944,81	5.211,65	5.489,37
C. Industri Pengolahan	93.241,47	104.224,00	80.648,62	83.042,09
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	586,21	514,67	531,92	551,65
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	441,82	501,06	373,84	396,43
F. Konstruksi	60.997,62	71.225,77	48.144,38	51.411,36
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	78.324,82	89.597,00	69.025,21	73.817,64
H. Transportasi dan Pergudangan	22.990,25	25.923,44	18.075,25	19.107,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.598,78	12.283,32	8.663,61	9.225,42
J. Informasi dan Komunikasi	9.594,39	10.287,35	9.625,11	10.321,29
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	15.738,02	17.155,25	12.738,47	13.100,35
L. Real Estate	20.078,79	22.786,42	16.072,86	17.132,22
M,N. Jasa Perusahaan	4.224,04	4.836,42	3.395,10	3.624,70
R. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16.427,96	18.832,08	12.940,56	13.836,00
S. Jasa Pendidikan	8.848,51	9.930,06	7.970,45	8.478,26
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	4.020,16	4.604,43	3.554,52	3.803,27
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.332,95	2.690,05	1.908,14	2.042,55
PDRB	470.221,98	523.771,57	398.779,25	419.649,28

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2014 PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 523,77 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp. 419,65 triliun. Atas dasar harga berlaku, lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah bruto yang terbesar pada tahun 2014 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 121,44 triliun, disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp.104,22 triliun, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 89,60 triliun, lapangan usaha konstruksi sebesar Rp. 71,23 triliun, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 25,92 triliun, lapangan usaha *real estate* sebesar Rp. 22,79 triliun, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 18,83 triliun, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp. 17,16 triliun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp.12,28 triliun, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar Rp.10,29 triliun, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 9,93 triliun, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 6,94 triliun, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar Rp. 4,84 triliun, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp.4,60 triliun, dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar Rp. 2,69 triliun. Lapangan usaha lainnya yaitu lapangan usaha pengadaan listrik, dan gas menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp. 514,67 miliar, dan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang sebesar Rp. 501,06 miliar.

Pada tahun 2014, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara sebesar 23,18%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,90%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,11%, lapangan usaha konstruksi sebesar 13,60%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 4,95%, lapangan usaha *real estate* sebesar 4,35%, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,60%, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,28%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,35%, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 1,96%, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 1,90%, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,33%. Sedangkan 5 (lima) lapangan usaha lainnya memiliki peranan di bawah 1 %.

Tabel 1.11
PDRB Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2013-2014 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}	Tahun 2013 ^{*)}	Tahun 2014 ^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	254.143,00	287.749,04	204.960,54	215.632,89
2. Konsumsi LNPRT	4.675,82	5.128,86	4.329,80	4.533,95
3. Konsumsi Pemerintah	37.073,84	41.220,31	29.486,57	30.757,35
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	149.264,33	165.345,85	120.540,43	124.069,63
5. Perubahan Inventori	6.064,22	5.770,57	5.667,68	4.290,17
6. Ekspor Barang dan Jasa	170.702,98	182.703,65	177.412,25	185.076,47
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	151.702,21	164.146,71	143.618,02	144.711,18
PDRB	470.221,98	523.771,57	398.779,25	419.649,28

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2014, komponen konsumsi rumah tangga bila dibandingkan dengan tahun 2013, merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 5,21%, atau dari Rp.204,96 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 215,63 triliun pada tahun 2014. Disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit meningkat 4,72% atau dari Rp.4,33 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 4,53 triliun pada tahun 2014. Komponen ekspor barang dan jasa meningkat 4,32% atau dari Rp. 177,41 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.185,08 triliun pada tahun 2014. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 4,31%, atau dari Rp. 29,49 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.30,76 triliun pada tahun 2014. Komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto meningkat 2,93% atau dari Rp. 120,54 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 124,07 triliun pada tahun 2014, dan komponen impor barang dan jasa naik 0,76% atau dari Rp. 143,62 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 144,71 triliun pada tahun 2014.

Atas dasar harga berlaku, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga naik dari Rp. 254,14 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp.287,75 triliun pada tahun 2014 atau naik 13,22%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit atas dasar harga berlaku juga naik dari Rp. 4,68 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 5,13 triliun pada tahun 2014, atau naik 9,69%. Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp.37,07 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 41,22 triliun pada tahun 2014, atau meningkat 11,18%.

Komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 149,26 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 165,35 triliun pada tahun 2014, atau naik 10,77%.

Nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku naik dari Rp. 170,70 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 182,70 triliun pada tahun 2014, atau naik 7,03%. Nilai impor barang dan jasa Sumatera Utara atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 151,70 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 164,15 triliun pada tahun 2014, atau naik 8,20 %.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2014 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara, sebesar 54,94 %. Disusul oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 31,57 %, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 7,87 %, komponen ekspor barang dan jasa netto 3,54% (ekspor barang dan jasa 34,88% dan impor barang dan jasa 31,34%), komponen pengeluaran perubahan inventori 1,10 % dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,98 %.

Terhadap besarnya sumbangan masing-masing lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 5,23%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi sumbangan 1,20%, disusul lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,10%, lapangan usaha konstruksi 0,82 %, lapangan usaha industri pengolahan 0,60 %, lapangan usaha *real estate* 0,27%, lapangan usaha transportasi dan

perdagangan 0,26%, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 0,22%, lapangan usaha informasi dan komunikasi 0,17%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 0,14 %, dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 0,13% dan Sedangkan 7 (tujuh) lapangan usaha lainnya menyumbang pertumbuhan di bawah 0,1 %.

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2014 yang mencapai 5,23 %, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberi sumbangan sebesar 2,68 %, disusul oleh komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa neto 1,65 % (ekspor barang dan jasa 1,92 % dan impor barang dan jasa 0,27%), komponen pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto 0,89%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 0,32 %, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit 0,05% dan komponen pengeluaran perubahan inventori -0,35 %.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2013 se Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada kisaran 3 sampai dengan 12%. Kabupaten Deli Serdang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 12,79%, disusul oleh Kota Tebing Tinggi sebesar 6,91 %, Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 6,85 %, Kota Binjai sebesar 6,58 %, dan Kabupaten Samosir sebesar 6,46 %. Sedangkan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 3,35%, diikuti Kota Medan sebesar 4,30%, Kabupaten Simalungun sebesar 4,48%, Kota Tanjungbalai sebesar 4,52% dan Kabupaten Karo sebesar 4,72%.

Tabel 1.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2009-2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	6,62	6,75	6,81	6,24	6,43
02. Mandailing Natal	6,40	6,41	6,40	6,41	6,41
03. Tapanuli Selatan	4,05	5,06	5,30	5,22	5,21
04. Tapanuli Tengah	5,76	6,17	6,28	6,35	6,85
05. Tapanuli Utara	4,98	5,56	5,54	5,95	6,05
06. Tobasamosir	5,30	5,50	5,26	5,52	5,14
07. Labuhanbatu	4,88	5,15	5,72	6,11	6,00
08. Asahan	4,67	4,97	5,37	5,57	5,83
09. Simalungun	4,92	5,12	5,81	6,06	4,48
10. Dairi	4,72	5,02	5,28	5,44	5,46
11. Karo	5,17	6,03	6,59	6,34	4,72
12. Deli Serdang	5,55	5,98	6,01	6,06	12,79
13. Langkat	5,04	5,74	5,78	5,66	5,97
14. Nias Selatan	4,08	4,12	4,46	5,78	5,16
15. Humbang Hasundutan	5,32	5,45	5,94	5,99	6,03
16. Pakpak Bharat	5,83	6,77	5,98	6,02	5,86
17. Samosir	5,10	5,59	5,96	6,07	6,46
18. Serdang Bedagai	5,92	6,14	5,98	6,00	5,97
19. Batubara	4,30	4,65	5,11	4,37	3,35
20. Padang Lawas Utara	5,70	6,74	6,81	6,38	6,13
21. Padang Lawas	5,14	5,56	6,39	6,31	6,12
22. Labuhanbatu Selatan	4,94	5,68	6,21	6,38	6,05
23. Labuhanbatu Utara	5,29	5,61	6,13	6,33	6,33
24. Nias Utara	6,59	6,73	6,68	5,88	6,25
25. Nias Barat	5,66	6,30	6,76	4,93	5,81
26. Sibolga	5,70	6,04	5,09	5,34	5,80
27. Tanjungbalai	4,17	4,75	4,86	4,99	4,52
28. Pematangsiantar	5,36	5,85	6,02	5,71	5,16
29. Tebing Tinggi	5,95	6,04	6,67	6,75	6,91
30. Medan	6,55	7,16	7,69	7,63	4,30
31. Binjai	5,87	6,07	6,28	6,34	6,48
32. Padangsidimpuan	5,83	5,81	5,88	6,23	6,20
33. Gunungsitoli	7,45	6,24	6,46	6,28	6,35
Sumatera Utara	5,07	6,42	6,63	6,22	6,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pada tahun 2013, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten/kota yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara masing-masing sebesar 29,64%, 14,82 %, 6,24 %, dan 5,55 %, sedangkan kabupaten/kota lainnya juga memberikan kontribusi tetapi dalam jumlah persentase yang relatif kecil. Kabupaten Asahan sebesar 4,34%, Kabupaten Simalungun sebesar 3,64%, Kabupaten Serdang Bedagai 3,48 %, Kabupaten Labuhanbatu 2,70%, Kabupaten Labuhanbatu Utara 2,60 %, Kabupaten Karo 2,36 %, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2,28%, Kota Binjai 1,84 %, Kabupaten Mandailing Natal 1,38%, Kabupaten Dairi 1,32%, Kota Pematangsiantar 1,31%, Kabupaten Tapanuli Utara 1,27%, Kabupaten Tobasamosir 1,24%, Kabupaten Tapanuli Selatan 1,11%, dan Kota Tanjungbalai 1,00%. Kontribusi di bawah 1 % yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan 0,89%, Kota Tebing Tinggi 0,86 %, Kabupaten Tapanuli Tengah 0,82 %, Kabupaten Nias Selatan 0,73 %, Kota Gunungsitoli 0,72%, Kota Padangsidempuan 0,71%, Kabupaten Padang Lawas Utara 0,62 %, Kabupaten Padang Lawas 0,58%, Kabupaten Samosir 0,55 %, Kota Sibolga 0,53 %, Kabupaten Nias 0,41%, Kabupaten Nias Utara 0,41%, Kabupaten Nias Barat 0,21%, dan Kabupaten Pakpak Bharat 0,12 %.

Tabel 1.13
 Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013
 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. Nias	982,94	1 140,43	1 299,65	1 439,73	1 638,83
02. Mandailing Natal	3 385,34	3 717,81	4 276,71	4 808,31	5 573,13
03. Tapanuli Selatan	2 761,51	3 145,18	3 573,33	4 006,03	4 485,93
04. Tapanuli Tengah	2 000,27	2 296,07	2 572,05	2 880,68	3 304,28
05. Tapanuli Utara	3 392,63	3 807,80	4 157,53	4 564,75	5 121,10
06. Tobasamosir	3 056,88	3 429,77	3 857,58	4 395,20	5 010,99
07. Labuhanbatu	6 658,79	7 610,59	8 550,34	9 526,34	10 894,86
08. Asahan	10 435,94	11 931,68	13 650,24	15 376,29	17 525,62
09. Simalungun	9 272,02	10 360,95	11 627,58	13 055,30	14 694,53
10. Dairi	3 393,00	3 777,74	4 226,28	4 731,42	5 345,42
11. Karo	5 646,54	6 676,02	7 634,39	8 512,71	9 550,52
12. Deli Serdang	34 172,48	39 804,28	45 125,83	50 667,52	59 862,75
13. Langkat	14 789,83	17 037,98	19 565,25	22 166,50	25 189,51
14. Nias Selatan	2 014,35	2 244,82	2 442,56	2 678,83	2 947,37
15. H. Hasundutan	2 189,65	2 468,65	2 791,89	3 179,57	3 612,23
16. Pakpak Bharat	290,30	331,84	373,19	420,52	479,46
17. Samosir	1 519,32	1 669,60	1 835,40	2 019,69	2 240,76
18. Serdang Bedagai	8 490,36	9 697,60	10 905,56	12 313,15	14 041,79
19. Batubara	14 517,23	16 590,57	18 994,98	21 006,93	22 418,91
20. Padang Lawas Utara	1 424,47	1 725,25	1 957,90	2 189,62	2 487,98
21. Padang Lawas	1 349,42	1 597,82	1 850,14	2 067,67	2 333,84
22. Labuhanbatu Selatan	6 284,98	7 161,09	8 094,36	9 032,13	9 189,50
23. Labuhanbatu Utara	5 472,19	6 288,95	7 101,85	7 984,44	10 501,60
24. Nias Utara	998,84	1 136,17	1 293,29	1 428,39	1 618,49
25. Nias Barat	507,06	589,40	673,15	747,01	844,57
26. Sibolga	1 361,12	1 543,78	1 698,29	1 884,81	2 125,85
27. Tanjungbalai	2 765,28	3 088,52	3 373,86	3 692,18	4 025,36
28. Pematangsiantar	3 746,22	4 163,38	4 531,59	4 897,69	5 281,37
29. Tebing Tinggi	2 033,00	2 302,74	2 608,91	2 964,04	3 453,99
30. Medan	72 630,21	83 315,02	93 610,76	105 400,44	119 715,48
31. Binjai	4 308,94	4 945,36	5 701,43	6 593,39	7 428,96
32. Padangsidimpuan	1 900,04	2 099,89	2 304,04	2 561,84	2 866,37
33. Gunungsitoli	1 781,86	2 009,06	2 305,74	2 543,99	2 927,31
Sumatera Utara	236 353,62	275 056,51	314 372,44	351 118,16	403 933,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Tabel 1.14
 Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01. N i a s	478,51	510,79	545,56	579,58	616,87
02. Mandailing Natal	1 909,49	2 031,96	2 161,96	2 300,54	2 447,98
03. Tapanuli Selatan	1 697,91	1 783,88	1 878,42	1 976,50	2 099,00
04. Tapanuli Tengah	1 128,83	1 198,51	1 273,80	1 354,65	1 447,37
05. Tapanuli Utara	1 529,40	1 614,37	1 703,75	1 805,19	1 914,42
06. Tobasamosir	1 670,06	1 761,93	1 854,52	1 956,87	2 057,48
07. Labuhanbatu	3 101,70	3 261,57	3 448,18	3 658,83	3 879,01
08. A s a h a n	5 134,42	5 389,83	5 679,51	5 995,60	6 345,25
09. Simalungun	5 299,69	5 571,11	5 894,59	6 251,83	6 531,90
10. Dairi	1 952,59	2 050,67	2 158,86	2 276,25	2 400,45
11. Karo	3 175,60	3 367,19	3 589,13	3 816,81	3 996,71
12. Deli Serdang	13 698,06	14 516,73	15 389,01	16 322,03	18 409,80
13. L a n g k a t	6 819,23	7 210,56	7 627,00	8 058,65	8 527,34
14. Nias Selatan	1 182,90	1 231,58	1 286,52	1 360,87	1 431,03
15. Humbang Hasundutan	954,55	1 006,56	1 066,34	1 130,26	1 198,35
16. Pakpak Bharat	154,42	164,88	174,74	185,26	196,13
17. Samosir	1 002,46	1 058,49	1 121,62	1 189,69	1 266,56
18. Serdang Bedagai	4 287,25	4 550,68	4 822,99	5 112,21	5 417,22
19. Batubara	7 066,22	7 394,49	7 772,03	8 111,47	8 382,81
20. Padang Lawas Utara	734,28	783,76	837,15	890,59	945,20
21. Padang Lawas	710,76	750,29	798,26	848,65	900,59
22. Labuhanbatu Selatan	2 993,33	3 163,22	3 359,75	3 574,05	3 393,58
23. Labuhanbatu Utara	2 685,09	2 835,77	3 009,51	3 200,06	3 800,37
24. Nias Utara	459,23	490,12	522,87	553,64	588,25
25. Nias Barat	239,04	254,10	271,27	284,65	301,20
26. S i b o l g a	697,92	740,04	777,72	819,28	866,83
27. Tanjungbalai	1 333,34	1 396,69	1 464,56	1 537,57	1 607,03
28. Pematangsiantar	1 926,30	2 039,00	2 161,82	2 285,31	2 403,10
29. Tebing Tinggi	1 099,24	1 165,58	1 243,37	1 327,25	1 419,00
30. M e d a n	33 430,05	35 822,22	38 576,23	41 519,32	43 303,96
31. B i n j a i	1 905,18	2 020,90	2 147,82	2 284,05	2 426,09
32. Padangsidempuan	884,66	936,05	991,12	1 052,89	1 118,07
33. Gunungsitoli	817,03	867,97	924,07	982,09	1 044,89
Sumatera Utara	111 559,22	118 718,90	126 587,62	134 463,95	142 537,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Tabel 1.15
 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Sumatera Utara
 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
01 Nias	7 493 663	8 680 596	9 794 032	10 775 535	12 187 447
02 Mandailing Natal	8 421 832	9 181 016	10 418 838	11 643 290	13 219 666
03 Tapanuli Selatan	10 421 792	11 921 917	13 399 807	14 833 755	16 550 022
04 Tapanuli Tengah	6 548 246	7 377 349	8 020 490	8 777 140	9 846 097
05 Tapanuli Utara	12 263 154	13 635 481	14 692 361	15 970 560	17 755 285
06 Tobasamosir	17 701 752	19 810 463	22 052 114	24 955 767	28 242 211
07 Labuhanbatu	16 312 180	18 333 913	20 041 430	22 040 815	24 497 588
08 Asahan	15 724 277	17 854 521	20 127 633	22 430 374	25 299 321
09 Simalungun	11 313 479	12 670 540	14 071 628	15 686 321	17 529 062
10 Dairi	12 573 501	13 988 884	15 502 978	17 254 559	19 367 097
11 Karo	16 350 255	19 022 157	21 183 934	23 139 082	25 440 787
12 Deli Serdang	19 582 848	22 231 676	24 458 632	26 749 612	30 854 178
13 Langkat	15 329 540	17 609 678	19 974 161	22 431 480	25 264 322
14 Nias Selatan	7 006 615	7 748 575	8 296 801	8 990 138	9 771 060
15 Humbang Hasundutan	12 900 615	14 381 889	15 988 874	17 987 365	20 183 211
16 Pakpak Bharat	7 299 834	8 192 597	8 926 340	9 854 500	10 998 542
17 Samosir	12 614 531	13 953 708	15 191 920	16 607 508	18 299 543
18 Serdang Bedagai	14 271 859	16 332 092	18 217 870	20 480 925	23 252 929
19 Batubara	38 856 947	44 137 361	49 684 117	53 990 109	57 211 227
20 Padang Lawas Utara	6 487 097	7 658 950	8 487 325	9 266 670	10 285 985
21 Padang Lawas	6 151 382	7 148 108	7 930 884	8 626 559	9 499 042
22 Labuhanbatu Selatan	20 103 050	22 648 778	24 789 866	27 342 238	30 589 642
23 Labuhanbatu Utara	19 136 783	21 654 269	24 082 333	26 967 991	30 543 882
24 Nias Utara	7 888 143	8 929 038	10 034 573	10 968 554	12 311 351
25 Nias Barat	6 209 717	7 204 768	8 148 368	8 967 766	10 083 011
26 Sibolga	16 104 340	18 273 656	19 951 909	22 041 307	24 774 739
27 Tanjungbalai	18 097 251	19 997 561	21 338 683	22 983 634	24 778 443
28 Pematangsiantar	16 008 238	17 739 296	18 981 676	20 286 468	21 750 775
29 Tebing Tinggi	14 142 283	15 853 818	17 603 851	19 696 039	22 636 619
30 Medan	34 812 509	39 718 983	43 932 544	48 908 864	55 151 219
31 Binjai	17 672 425	20 090 526	22 723 829	25 904 991	28 792 287
32 Padangsidimpuan	10 260 996	10 963 728	11 749 507	12 834 953	14 109 915
33 Gunungsitoli	14 258 493	15 919 381	17 930 540	19 495 782	22 110 915
Sumatera Utara	18 381 013	21 108 505	23 778 381	26 184 746	29 722 268

Sumber : Badan Pusat Statistik Provsu

Pencapaian kinerja perekonomian Sumatera Utara di tahun 2014 didukung oleh inflasi, berdasarkan pengamatan di 4 kota, yakni Kota Medan sebesar 8,24%, Kota Pematangsiantar sebesar 7,94 %, Kota Sibolga sebesar 8,36 %, dan Kota Padangsidimpuan sebesar 7,38 %. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai 8,17%, lebih rendah dari inflasi Nasional yang mencapai 8,36%.

Kegiatan perdagangan luar negeri Sumatera Utara hingga bulan Desember 2014 telah mencatat surplus sebesar US\$ 4,31 miliar dengan ekspor sebesar US\$ 9,36 miliar dan impor sebesar US\$ 5,05 miliar, secara rinci neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
2002-2014

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
2002	6 622 573	2 891 996	2 684 055	819 298	2 072 698
2003	5 490 113	2 687 877	2 343 112	679 810	2 008 067
2004	7 512 890	4 239 409	3 221 858	953 359	3 286 050
2005	8 174 804	4 563 075	3 717 119	1 178 006	3 385 069
2006	8 704 825	5 523 900	4 404 172	1 456 987	4 066 913
2007	7 841 872	7 082 899	4 745 767	2 109 879	4 973 020
2008	8 520 892	9 261 976	5 880 760	3 696 064	5 565 913
2009	8 058 927	6 460 118	5 236 554	2 724 234	3 735 884
2010	7 992 103	9 147 778	6 171 734	3 576 248	5 571 530
2011	8 161 003	11 883 268	6 718 063	4 953 462	6 929 806
2012	8 695 942	10 393 936	6 813 898	5 164 751	5 229 185
2013	9 275 891	9 598 008	6 949 116	5 108 512	4 489 497
2014	9 087 526	9 361 110	7 391 305	5 046 514	4 314 598

Sumber : BPS Provsu

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pembangunan Sumatera Utara merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya visi merupakan simpul atau *starting point* dalam menyusun pembangunan Sumatera Utara.

Visi merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Gubernur Sumatera Utara tahun 2013-2018 diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara.

A. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah tahap III Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka visi pembangunan Sumatera Utara tahun 2013-2018 adalah :

**”Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju
Sumatera Utara Sejahtera”**

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dicapai, kegiatan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang penting bagi suatu organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut misi sebaiknya dapat menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dan hal yang penting dalam pencapaian visi adalah :

- a. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- b. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.
- c. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- d. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- e. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, maka pemerintah daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima)

misi yang telah disusun dengan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

1. Strategi Pembangunan Daerah

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia.
- e. Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.
- b. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan.

- b. Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Peningkatkan aksesibilitas dan pemeratakan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi.
- b. Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian misi kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
- b. Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH.
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- d. Revitalisasi SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
- e. Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian.
- f. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar

selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Agenda Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain : transportasi, permukiman, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

b. Agenda Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti infrastruktur, kesehatan, prasarana layanan umum lainnya terus dilaksanakan secara

konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

c. Agenda kebijakan Tahun ketiga (Tahun 2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit

kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Sumatera Utara.

d. Agenda Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing.

e. Agenda Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2018)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima

difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaiannya.

C. Prioritas Daerah

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dapat digambarkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun kedepan akan diprioritaskan kepada 9 prioritas yakni :

1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah.

5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.
8. Peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan.
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah, meliputi :
 - a. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.
 - b. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
 - c. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGS) 2011-2015.
 - d. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.
 - e. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.
 - f. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.
 - g. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pengarusutamaan gender (RAD - PUG).
 - h. Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014, terdiri dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan
12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu :
 - a. bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - b. bidang perekonomian dan;
 - c. bidang kesejahteraan rakyat,

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

Tahun 2014 merupakan masa transisi dalam regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejak tahun 2004 s.d 2014 diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 30 September 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, walaupun dalam pasal 409 huruf b dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, namun dalam pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, sepanjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2014, masih tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan itu, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, menetapkan bahwa tahun pertama pembangunan jangka menengah kedua diawali pada tahun anggaran 2014, sehingga fokus program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk mewujudkan visi *“menjadi provinsi yang*

berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera” sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya.

Selanjutnya pengalokasian anggaran berdasarkan penyelenggaraan urusan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

B. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pendidikan

Hasil-hasil yang dicapai terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

- a. Angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM)
 - 1) Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2013 sebesar 33,87 % menjadi 65,02 % pada tahun 2014.
 - 2) Angka partisipasi kasar pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat pada tahun 2013 dicapai 106,26 % menjadi 114,38 % pada tahun 2014.
 - 3) Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama/ sederajat pada tahun 2013 dicapai 88,55 % menjadi 101,22% pada tahun 2014.
 - 4) Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas/ sederajat pada tahun 2012 dicapai 80,58 % menjadi 86,74 % pada tahun 2014.

- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar tahun 2013 dicapai 93,26 % menjadi 93,59 % tahun 2014.
 - 6) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun 2013 dicapai 70,51 % menjadi 80,90 % tahun 2014.
 - 7) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun 2013 dicapai 60,02 % menjadi 64,36% tahun 2014.
- b. Jumlah siswa pada jenjang TK/KB/Penitipan Anak/SPS tahun 2013 sebanyak 467.295 orang menjadi 793.249 orang pada tahun 2014.
Jumlah siswa pada jenjang TK/KB/Penitipan Anak/SPS pada tahun 2013 belum termasuk jumlah siswa satuan PAUD sejenis (SPS), sedangkan jumlah siswa pada jenjang TK/KB/Penitipan Anak/SPS pada tahun 2014 sudah termasuk jumlah siswa Satuan PAUD Sejenis (SPS) sehingga adanya kenaikan yang begitu signifikan.
- c. Perkembangan angka putus sekolah
- 1) Angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2013 adalah sebanyak 23.733 siswa dan menjadi 20.495 siswa pada tahun 2014.
 - 2) Angka putus sekolah SMP/MTS pada tahun 2013 adalah sebanyak 9.305 siswa dan menjadi 9.320 siswa pada tahun 2014.
 - 3) Angka putus sekolah SMA/MA pada tahun 2013 adalah sebanyak 7.576 siswa dan menjadi 6.879 siswa pada tahun 2014.

- d. Perkembangan angka kelulusan
 - 1) Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2013 adalah sebanyak 286.681 siswa, menjadi 288.626 siswa pada tahun 2014.
 - 2) Angka kelulusan SMP/MTS pada tahun 2013 adalah sebanyak 236.957 siswa, menjadi 249.083 siswa pada tahun 2014.
 - 3) Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2013 adalah sebanyak 177.254 siswa, menjadi 202.748 siswa pada tahun 2014.

- e. Perkembangan angka melanjutkan sekolah
 - 1) Jumlah melanjutkan SD/MI pada tahun 2013 adalah sebanyak 235.062 orang, menjadi 205.729 orang pada tahun 2014.
 - 2) Jumlah melanjutkan SMP/MTS pada tahun 2013 adalah sebanyak 210.755 orang, menjadi 226.047 orang pada tahun 2014.

- f. Jumlah guru yang berijazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4 pada tahun 2013 sebanyak 116.884 guru dan tahun 2014 sebanyak 120.581 guru.

- g. Perkembangan pencapaian program wajib belajar 12 tahun 2013, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Wajib Belajar 12 Tahun, mengingat saat ini peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU).

- h. Pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Binaan pada TA. 2012/2013 sebanyak 120 siswa dan TA. 2013/2014 sebanyak 348 untuk tahun 2014 sebanyak 357 siswa
- i. Angka melek huruf 15 tahun keatas pada tahun 2013 adalah 97,51%, menjadi 97,54 % pada tahun 2014.
- j. Penyandang ketunaan
 - 1) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2013 adalah 3.457 orang menjadi 1.608 orang pada tahun 2014.
 - 2) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTS tahun 2013 adalah 303 orang menjadi 190 orang pada tahun 2014.
 - 3) Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2013 adalah 176 orang menjadi 72 orang pada tahun 2014.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Saat ini derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator capaian kinerja bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Berdasarkan angka BPS, AKB mampu diturunkan dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 25,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (sensus penduduk 2010). berdasarkan trend penurunan yang terjadi kurun waktu 2001-2010, dimana penurunan terjadi sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2013

yaitu 21,59 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2014 yaitu 20,22 per 1.000 kelahiran hidup, dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) kesehatan ibu dan anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2013 dari 267.239 kelahiran hidup terdapat 1.624 kematian bayi dan tahun 2014 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 1.078 bayi dari 228.947 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI tahun 2012 dan 2013, masih mempergunakan angka hasil survei AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 adalah 268/100.000 kelahiran hidup, dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2013 dari 267.239 kelahiran hidup terdapat 254 kematian ibu dan tahun 2014 jumlah ibu melahirkan yang meninggal adalah sebanyak 187 orang dari 228.947 kelahiran hidup.

c. Umur Harapan Hidup (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013 UHH penduduk Sumatera Utara yaitu 67,98 tahun dan pada tahun 2014 adalah 68,15 tahun (BPS, 2013-2014).

Berdasarkan data BPS, UHH Penduduk Sumatera Utara meningkat dari 67,3 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,81 tahun pada tahun 2012. Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2004-2012, dimana terjadi peningkatan umur penduduk sebesar 0,16 tahun

setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Sumatera Utara mencapai 69,97 tahun pada tahun 2013 dan 70,13 tahun pada tahun 2014. Dengan demikian target sasaran utama UHH pada tahun 2014 yaitu 71,7 tahun belum mampu dicapai.

d. Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk mengalami penurunan dari 19,7% pada tahun 2013 dan menjadi 21,05 % pada tahun 2014.

e. Ketersediaan Sarana Kesehatan

Pada tahun 2014 telah tersedia 570 unit Puskesmas, dengan perincian 170 unit Puskesmas Rawat Inap dan 400 unit Puskesmas Non Perawatan; Puskesmas Pembantu sebanyak 2.085 unit dan 522 unit Puskesmas Keliling yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 4 Puskesmas atau satu Puskesmas melayani 23.379 jiwa penduduk dan satu Puskesmas pembantu telah melayani 3-4 desa.

Tahun 2013 Provinsi Sumatera Utara memiliki 200 unit Rumah Sakit (RS) dengan rincian : 48 unit RS. Pemerintah, 10 unit RS. BUMN dan 142 unit RS. Swasta, sedangkan pada tahun 2014 memiliki 208 unit Rumah Sakit dengan rincian 49 unit RS. Pemerintah, 13 unit RS. BUMN dan 146 unit RS. Swasta.

f. Ketersediaan tenaga medis

Jumlah tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu antara lain :

- 1) Jumlah tenaga dokter spesialis meningkat dari 2.098 orang menjadi 2.672 orang.
- 2) Jumlah tenaga dokter umum tahun 2013 sejumlah 2.971 orang, dan pada tahun 2014 sejumlah 2.705 orang.
- 3) Jumlah tenaga dokter gigi meningkat dari 915 orang menjadi 965 orang.
- 4) Jumlah tenaga perawat tahun 2013 sejumlah 15.765 orang, dan pada tahun 2014 sejumlah 15.292 orang.
- 5) Jumlah tenaga bidan tahun 2013 sejumlah 12.792 orang, dan pada tahun 2014 sejumlah 12.326 orang.

g. Ketersediaan obat dan vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin mengalami peningkatan yaitu dari 54,74 % pada tahun 2013 meningkat menjadi 72,07% pada tahun 2014.

h. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Sama seperti pada tahun 2013, maka tahun 2014 jumlah penduduk miskin yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS bersumber dari APBN sebanyak 4.191.454 jiwa, APBD Provsu sebanyak 211.203 jiwa dan APBD kabupaten/kota sebanyak 252.043 jiwa, seluruhnya 100% mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di rumah sakit.

i. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2013, terdapat 44 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan seluruh desa (100%) dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam, dan pada tahun 2014

terdapat 33 desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) dan seluruh desa (100%) dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam oleh Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

- j. Cakupan desa siaga aktif
Jumlah desa siaga di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 dan 2014 yaitu 4.459 desa atau 21,70%.
- k. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin
cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin pada tahun 2013 dan 2014 yaitu 100%.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Isu yang saat ini lagi berkembang salah satunya adalah menurunnya kualitas air sungai, sungai-sungai di Indonesia mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia terutama masyarakat perkotaan sebagai sarana irigasi, sumber air minum, keperluan industri dan lain-lain. Tetapi dalam kurun waktu lima tahun ini kualitas air telah mengalami penurunan hal ini disebabkan karena Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Utara mulai menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Pendangkalan sungai mulai terjadi dimana-mana dan banyak tercemar oleh limbah diantaranya yakni :

- a. Limbah rumah tangga berupa detergen, tinja, dan sampah yang sengaja dibuang ke sungai.
- b. Limbah industri berupa berbagai zat kimia dan logam berat yang berbahaya dan beracun.
- c. Limbah pertanian seperti sisa pestisida dan pupuk.
- d. Racun dari kegiatan penangkapan ikan yang terlarang.

Upaya penganggulangan pencemaran sungai telah dilakukan sebagai berikut berikut.

- a. **Membatasi.** Limbah harus diminimalisir dan kalau bisa didaur ulang, jika tidak bisa didaur ulang limbah harus dinetralisir agar tidak mencemari sungai.
- b. **Mengawasi.** Masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya harus turut mengawasi dan menjaga pelestarian air.
- c. **Mengendalikan.** Pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup harus tegas, para pelanggar diberi sanksi.
- d. Upaya penganggulangan dengan cara membuat papan himbauan disepanjang sungai.
- e. Membuat taman di sempadan sungai.
- f. Membuat jaring penyaring sampah di sekitar sungai deli.

Beberapa langkah untuk menanggulangi permasalahan sampah di Sumatera Utara di antaranya sebagai berikut :

- a. Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengelola sampah, lokasinya harus jauh dari permukiman penduduk.

- b. Penerapan prinsip 4R : *replace* (mengganti), *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).
- c. Penempatan bak sampah yang terpisah antara organik dan anorganik sehingga mempermudah pengelolaannya.
- d. Memproduksi dan memasyarakatkan peralatan untuk mendaur ulang sampah.
- e. Mengadakan kerja bakti secara berkala.

Selain itu terkait dengan urusan wajib Lingkungan Hidup dapat disampaikan bahwa indikator penataan lingkungan adalah jumlah keputusan yang mempertimbangkan kepentingan konservasi dan pengendalian dampak lingkungan serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah diambil diprioritaskan pada :

- a. Pencemaran udara dari target capaian 2013 sebanyak 3 kabupaten/kota yakni : Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi kemudian pada tahun 2014 juga BLH Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemantauan status mutu udara ambient sebanyak 4 kabupaten/kota yakni Kabupaten Karo, Deli Serdang, Kota Medan dan Binjai.
- b. Jenis pelayanan informasi status mutu air pada tahun 2014 yang dipantau kualitasnya dan ditetapkan status mutu airnya sebanyak 5 sungai yakni : Sungai Asahan, Sungai Wampu, Sungai Percut, Sungai Deli dan Sungai Batahan.
- c. Kabupaten yang tergolong baik sesuai dengan kriteria adipura pada tahun 2013 sebanyak 7 kabupaten/kota dari 16 kabupaten/kota yang ikut dinilai kebersihannya, diantaranya adalah : Kota Medan, Tanjungbalai, Sibolga, Pematangsiantar, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Labuhanbatu, sedangkan

pada tahun 2014 sebanyak 4 kabupaten/kota yakni : Kota Medan, Tanjungbalai, Tebing Tinggi dan Kabupaten Langkat yang mendapat adipura dari 8 kabupaten/kota yang ikut dinilai kebersihannya.

- d. Kabupaten yang menyediakan tempat pembuangan sampah untuk dipergunakan masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 7 kabupaten/kota yang terdiri dari : Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 162 unit, Nias Selatan 356 unit, Padang Lawas Utara 194 unit, Samosir 1 unit, Kota Binjai tong sampah permanen 17 unit dan 500 unit tong sampah liter, Kota Medan 1 paket, dan pada tahun 2014 sebanyak 918 buah yang terdiri dari Kabupaten Asahan 70 unit, Labuhanbatu Selatan 100 unit, Labuhanbatu Utara 123 unit, Padang Lawas 262 unit, Padang Lawas Utara 144 unit, Simalungun 70 unit, Tapanuli Selatan 20 unit, Toba Samosir 111 unit dan Kota Tebing Tinggi 18 unit.
- e. Dari penegakan hukum lingkungan tahun 2013 pengaduan yang diterima Badan Lingkungan Hidup Provsu : 5 kasus yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH RI) diserahkan ke Badan Lingkungan Hidup Provsu. Badan Lingkungan Hidup Provsu sendiri sebanyak 15 kasus yang diterima, 3 diantaranya dilanjutkan kasusnya dengan rincian 1 kasus diambil alih daerah dan ditindak lanjuti serta 2 kasus dihentikan sementara kegiatannya (diberikan sanksi administrasi), sedangkan kasus yang ditangani kabupaten/kota sebanyak 33 kasus pada tahun 2014. Penegakan hukum lingkungan pengaduan yang diterima Badan Lingkungan Hidup Provsu : 3 kasus yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH RI) dan ditangani oleh KLH yakni : Rumah Sakit Abdul Manan, Rumah Sakit Permata Bunda dan Hotel J.W Marriot diberikan sanksi administrasi di Badan Lingkungan Hidup Provsu sendiri sebanyak 10 kasus yang

diterima dan diverifikasi dan dilakukan pengawasan sedangkan kasus yang ditangani kabupaten/kota sebanyak 20 kasus dan 6 diantaranya dibina dan dilakukan pengawasan.

- f. Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan salah satu upaya program unggulan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang diberikan kepada daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara yang berupa kegiatan pengawasan dan pemberian kepada penanggungjawab usaha atau kegiatan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Saat ini perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) berjumlah 85 perusahaan pada tahun 2013, sedangkan tahun 2014 sebanyak 93 perusahaan.
- g. Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup. Pada tahun 2013 penerima penghargaan Kalpataru menjadi 4 orang.
- h. Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah dapat terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan. Pada tahun 2013 jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata sebanyak 40 sekolah dari berbagai kabupaten/kota. Pada tahun 2014 sekolah yang ikut Adiwiyata sebanyak 309 sekolah, yang mendapatkan penghargaan oleh Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan Pergub No. 188/454/KPTS/2014 tanggal 24 Juni 2014 sebanyak 211 sekolah dan mendapat Adiwiyata tingkat nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI No.183/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebanyak 72 sekolah.

- i. MIH (Menuju Indonesia Hijau) yang mempunyai program menurunkan laju deforestasi dan lahan kritis. Saat ini di Sumatera Utara jumlah kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013 sebanyak 5 kabupaten/kota antara lain : Kabupaten Asahan, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Labuhanbatu Utara, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 8 kabupaten terdiri dari : Kabupaten Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Langkat, Toba Samosir dan Nias Barat.
- j. SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Provinsi Sumatera Utara memperoleh Juara Harapan I.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

4.1 Dinas Bina Marga

Infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara sepanjang 38.715,29 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2.249,66 km, jalan provinsi sepanjang 3.048,50 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 33.367,13 km.

Tahun 2013 panjang jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap adalah sebesar 81,51%, jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 69,60 % dan jalan kabupaten/kota dalam kondisi mantap sebesar 57,95 %.

Sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2014 telah melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi sepanjang 216,87 km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 21,90 km, pembangunan jembatan dengan total panjang 637,7 m.

Tabel 3.1
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2013 dan 2014

TAHUN	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK RINGAN (KM)	RUSAK BERAT (KM)
2013	1.325,23	796,50	412,08	514,68
2014	1.190,19	1.078,56	259,00	520,75

Sumber : Dinas Bina Marga Provsu

4.2 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kewenangan provinsi untuk penanganan rawa dengan jumlah daerah rawa sebanyak 36 ha dan areal rawa luas 64.339 ha, dengan kondisi baik jaringan pembawa/pembuang 359.763 m, tanggul banjir 55.884 m, bangunan – bangunan rawa 216 m, dengan kondisi rusak ringan jaringan pembawa/pembuang 93.239 m, tanggul banjir 23.238 m, bangunan – bangunan rawa 52 m, dengan kondisi rusak berat jaringan pembawa/ pembuang 97.120 m, tanggul banjir 16.300 m, bangunan – bangunan rawa 12 m dan kondisi yang belum ada jaringan pembawa/pembuang 145.670 m, tanggul banjir 62.850 m, bangunan – bangunan rawa 23 m.

Kondisi infrastruktur di wilayah sungai kewenangan provinsi untuk tanggul 422.500 m, dimana dengan kondisi baik 201.025 m dan kondisi rusak ringan 174.130, sedangkan kondisi kritis/rawan 47.345 m. Pada infrastruktur perkuatan

tebing dengan jumlah 131.519 m, dengan kondisi baik 88.590 m, kondisi rusak ringan 40.949, dan kondisi rusak berat 1.980 m. yang belum ada untuk tanggul banjir sebanyak 102.500 m dan perkuatan tebing 37.001 m.

4.3 Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman

Di dalam bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan yang ditangani oleh pemerintah provinsi dan dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman adalah sebagai berikut :

a. Jumlah rumah bersanitasi/jaringan air limbah

Sesuai dengan SPM bidang Pekerjaan Umum bahwa pembangunan rumah tangga bersanitasi merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan kegiatan pengaturan dan pembinaan. Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 1.985.408 KK, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman telah membangun saluran air limbah sepanjang 21.150 m² dan melayani 4.230 KK serta telah melakukan pendataan dan identifikasi kawasan rawan sanitasi. Hasil ini akan ditindaklanjuti dengan membangun *pilot project* untuk sanitasi yang sehat dan diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjutinya.

b. Persampahan

Pada tahun 2014 telah dilakukan penyusunan masterplan persampahan dan TPA Regional Kabupaten Tapanuli Selatan - Kota Padangsidimpuan.

c. Pembangunan jalan

Telah dilakukan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 15 km dan jalan poros pendukung kegiatan ekonomi pedesaan sepanjang 15 km.

d. Perkembangan/pembangunan jaringan drainase

Pembangunan jaringan drainase yang dilakukan adalah saluran drainase yang terkait dengan lintas kabupaten/kota berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan hasil reses anggota DPRD. Saluran drainase sepanjang 256.182 m² dan melayani 51.236 KK.

5. Urusan Wajib Perumahan

Pada tahun 2012 telah dibangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1500 unit yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Untuk tahun 2013 telah dibangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1400 unit yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2014 telah dibangun 600 unit yang tersebar 4 kabupaten/kota. Untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara ada 509.943 rumah layak huni atau 2.549.716 KK (83,95%) dari total 607.437 rumah atau 3.037.185 KK, sedangkan rumah tidak layak huni ada 97.494 rumah atau 487.470 KK.

Pada pelaksanaan pembangunan rumah layak huni ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Kodam I/Bukit Barisan untuk pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Maret 2012.

Untuk penataan lingkungan kawasan kumuh yang sehat dan aman serta didukung pembangunan sarana dan fasilitas umum, telah dilaksanakan penataan lingkungan kawasan kumuh permukiman seluas \pm 1,6 ha. Dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 2014 telah dibangun prasarana dan sarana air bersih dari air minum kawasan pedesaan di 10 kabupaten/kota dengan perkiraan pelayanan rumah tangga yang dapat mengakses \pm 50 kepala keluarga untuk 1 (satu) lokasi sehingga jumlah KK dapat dilayani sebanyak 500 KK dengan luas cakupan wilayah 3,5 ha.

6. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Bertitik tolak dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 maka target dan realisasi yang dicapai memperoleh prestasi sebagai berikut :

Bidang Olahraga

- a. Kejuaaraan Dragon Boat di Thailand memperebutkan Piala Raja Thailand dengan memperoleh medali emas.
- b. Kejurnas Karate antar PPLP se Indonesia di Medan dengan prestasi juara umum dan memperoleh 6 medali emas.

- c. POPWIL I Sumatera di Jambi dengan prestasi juara umum dan memperoleh 10 medali emas, 5 medali perak dan 9 medali perunggu.
- d. Kejurnas Silat antar PPLP se Indonesia di Semarang dengan memperoleh 1 medali emas dan 1 medali perunggu.
- e. Kejurnas Angkat Berat antar PPLP se Indonesia di Banjarmasin dengan memperoleh 3 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu.
- f. Kejurnas Sepak bola antar PPLP se Indonesia di Bogor dengan memperoleh medali perunggu.
- g. Kejuaraan Tinju antar PPLP se Indonesia di Ternate dengan memperoleh 1 medali perak 1 medali perunggu.
- h. Kejuaraan Atletik antar PPLP se Indonesia di Tondano – Sulawesi Utara dengan memperoleh 3 medali perak.
- i. Kejuaraan Bulutangkis antar PPLP se Indonesia di Banyuasin – Sumatera Selatan, dengan memperoleh 2 medali perak.
- j. Kejuaraan Judo antar PPLP se Indonesia di Banten dengan memperoleh 1 medali perunggu.
- k. Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak bola Pelajar U-17 se Sumatera Utara memperebutkan Piala Gubsu, Juara I Kota Medan, Juara II Kota Binjai dan Juara III Kabupaten Deli Serdang.
- l. Kejuaraan Gulat antar PPLP Tahun 2014 di Padang – Sumatera Barat memperoleh 1 medali perunggu.
- m. PON Remaja I Tahun 2014 atlet PPLP Provsu memperoleh 1 medali emas cabang olahraga pencak silat, 1 perak dan 1 perunggu dari cabang olahraga atletik.

Bidang Pemuda

- a. Juara harapan III Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Bidang Kepeloporan Pendidikan, Borkat Rambe, S.Pd atas inspirasi dan kepedulian yang dibarengi ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya maka Saudara Borkat Rambe mempunyai ide untuk mendirikan satu lokal bangunan sekolah dengan biaya sendiri sebagai implementasi dari kepeloporan bidang pendidikan dimaksud yang dimulai sejak tahun 2006 menerima siswa-siswi serta mendapat respon positif dari masyarakat dan unsur pemerintahan (Kepala Desa Panobasan, Camat Angkola Barat) hal tersebut dilakukan atas dasar murni inisiatif dan kemauan yang bersangkutan tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah.
- b. PSP3 (Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) Angkatan XXIII Priode 2013-2015 sebanyak 36 orang (asal Provinsi Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan D.I Yogyakarta) yang ditempatkan di Kabupaten Serdang Berdagai sebanyak 18 orang dan Kabupaten Langkat sebanyak 18 orang, dari 36 peserta tersebut telah berhasil 1 orang peserta atas nama Fitriani Quota peserta dari Provinsi Sulawesi Selatan, mengangkat perekonomian pedesaan di Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Berdagai. Melalui usaha home industri rumahan (dodol dan kipang) dan sekarang telah mempunyai 8 orang karyawan.
- c. Melakukan pembinaan kepada para pemuda kabupaten/kota sebanyak 40 orang untuk menjadi wirausaha-wirausaha muda dari hasil pembinaan tersebut Tahun Anggaran 2014 terdapat 4 Kelompok Wirausaha Pemuda (KWP) yang berhasil mengangkat perekonomian di daerah masing-masing antara lain :

- 1) Kabupaten Deli Serdang KWP Keripik Pisang dan Peyek Kacang Restu Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa (sistem pemasaran ke warung-warung/kedai dan kafe-kafe).
 - 2) Kota Medan KWP Berkah Mandiri (budidaya lele jumbo Tj. Sari Psr. I Gg. Melati No. 21 Medan Selayang) sistem pemasaran dijemput pembeli.
 - 3) Kota Medan KWP Risolis (terdapat beberapa counter di Carrefour padang bulan, Plaza Medan Fair serta Beberapa Outlet di Jl. Mongonsidi dan Imam Bonjol).
 - 4) Kabupaten Langkat KWP Saung The Sheep (Ternak Kambing) Desa Paya Bengkuang Kecamatan Gebang, Sistem Pemasaran dijual pada saat hari raya kurban.
- d. Workshop upaya penanggulangan *Lost Generation* dan *Destruktif* yang dilaksanakan di 2 kabupaten/Kota yaitu :
- 1) Kabupaten Simalungun diikuti oleh 100 orang peserta (Pelajar, OKP, Pengurus Cabang Olahraga) yang Berasal dari Medan, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Batu Bara, Tebing Tinggi-Pematangsiantar, Simalungun, Humbang Hasundutan
 - 2) Kabupaten Asahan diikuti oleh 100 orang peserta (Pemuda Gereja dan Pelajar yang berasal dari Kabupaten Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Tebing Tinggi dan Medan).
- e. Roadshow Bahaya Narkoba dilaksanakan di 3 kabupaten/kota yaitu :
- 1) Kabupaten Deli Serdang masing-masing di perguruan Primbana diikuti oleh 100 orang pelajar dan di Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Kecamatan Tanjung Morawa diikuti oleh 100 orang pelajar.
 - 2) Kota Binjai dilaksanakan di Perguruan Tunas Pelita, diikuti oleh 100 orang pelajar.

- 3) Kota Medan dilaksanakan di 2 sekolah yaitu Perguruan Darmawangsa dan Perguruan Primbana, masing-masing diikuti oleh 100 orang pelajar.

Dari program tersebut di atas peserta diharapkan menjadi kader pemuda anti narkoba atau jejaring di lingkungan (sekolah perguruan tinggi, remaja mesjid, dan organisasi lainnya).

- f. Selain itu Disporasu telah melakukan test urine narkoba terhadap PNS Disporasu, Paskibraka dan Atlet PPLP.

7. Urusan Wajib Penanaman Modal

Capaian kinerja di bidang penanaman modal antara lain sebagai berikut :

- a. Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Sumatera Utara merupakan salah satu solusi peningkatan perekonomian daerah dan daya saing daerah serta diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Utara. peraturan daerah tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- b. Peresmian galeri promosi investasi dan kerajinan daerah Sumatera Utara di Bandara Internasional Kuala Namu, kerjasama antara Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara oleh Ketua Dekranasda Sumatera Utara (Hj. Sutias Gatot Pujo Nugroho).

- c. Perolehan sertifikat dengan predikat kepatuhan (zona hijau) dalam rangka standar layanan publik kepada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dari Ombudsman RI untuk tahun 2014.
- d. Penilaian kualifikasi bintang satu PTSP Provinsi oleh BKPM RI kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal BPMP Provsu melalui Surat Keputusan Kepala BKPM RI Nomor 138 Tahun 2014.
- e. Realisasi investasi selama tahun 2014 mencapai Rp. 11,621 triliun, dimana target realisasi investasi di Sumatera Utara untuk tahun 2014 sesuai dengan IKU sebesar Rp. 10 triliun, telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun 2014
Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Investasi (Rp. Milyar)
PMA		
1	Pertambangan	1.778.450,52
2	inds. kimia & farmasi	1.883.769,24
3	tanaman pangan & perkebunan	865.776,44
4	jasa lainnya	931.648,20
5	industri lainnya	357.508,52
6	industri makanan	333.759,84
7	perumahan & perkantoran	188.701,84
8	industri kayu	36.734,88
9	inds. barang logam	2.988,16
10	inds. min. non logam	2.763,12
11	hotel & restoran	1.405,92
12	konstruksi	1.002,24
13	industri kertas	5.178,24
	Jumlah	6.389.687,16
PMDN		
1	jasa lainnya	3.298.064,95
2	inds. logam dasar	449.376,00

No	Sektor	Investasi (Rp. Milyar)
3	industri makanan	375.725,30
4	industri lainnya	132.856,80
5	peternakan	50.825,90
6	tanaman pangan & perkebunan	750.088,55
7	industri kertas	3.623,30
8	Perhotelan	158.786,83
9	industri barang logam	12.423,22
10	industri kimia	128,00
	Jumlah	5.231.905,85

sumber : badan penanaman modal dan promosi provsu

Tabel 3.3
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN
Tahun 2013 dan Tahun 2014

No	Tahun	Jumlah proyek	Investasi (Rp. Juta)
PMDN			
1	2013	90	5.068.881,40,-
2	2014	86	5.231.905,85,-
PMA			
1	2013	165	8.519.539,20,-
2	2014	201	6.389.687,16,-

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu

Pada tahun 2013 sektor yang diminati PMDN adalah industri makanan, jasa, perkebunan dan industri kimia. Sektor yang diminati PMA adalah jasa, industri makanan, industri mineral non logam, industri kimia dan industri pakan ternak. Sedangkan untuk tahun 2014 sektor yang diminati PMDN adalah jasa lainnya, industri logam dasar, industri makanan, peternakan dan tanaman pangan dan perkebunan. Sektor yang diminati PMA adalah pertambangan, industri kimia dan farmasi, tanaman pangan dan perkebunan, jasa, dan industri lainnya.

Tabel 3.4
Izin Penanaman Modal Yang Diterbitkan Oleh BPMP
Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Izin Prinsip	Izin Prinsip Perluasan	Izin Prinsip Perubahan	Izin Usaha	Izin Usaha Perluasan	Izin Usaha Perubahan	Jumlah
2013	3	8	1	3	3	-	18
2014	6	5	11	3	1	1	27

Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Promosi Provsu

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi langsung dengan SPIPISE di BKPM RI Jakarta.

Dapat disampaikan juga bahwa untuk meningkatkan perbaikan kinerja di bidang penanaman modal tidak terlepas dari peran serta perangkat daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal (PDKPM) se Sumatera Utara, untuk itu Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota untuk :

- a. Menyiapkan peluang dan potensi investasi unggulan daerah.
- b. Menyusun data detail tentang potensi peluang investasi yang siap untuk dipromosikan.
- c. Membentuk kelembagaan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tabel 3.5
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian	Keadaan	
		2013	2014
1	jumlah koperasi	11.754	12.273
	aktif (unit)	6.967	7.480
	tidak aktif (unit)	4.787	4.793
2	Anggota (orang)	2.097.344	2.133.927
3	RAT (unit)	4.132	4.305
4	Manajer (orang)	1.489	1.596
5	Karyawan (orang)	11.468	12.096
6	Modal Sendiri (rp. 000)	2.082.192.106	3.058.101.432
7	Modal Luar (rp. 000)	1.818.155.840	1.520.777.633
8	Volume Usaha (rp. 000)	4.233.117.841	5.048.516.265
9	SHU (rp. 000)	373.120.625	500.512.930

Sumber : Dinas Koperasi dan Ukm Provsu

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara periode tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan sebesar 4,41 %, hal ini sejalan dengan jumlah koperasi aktif yang mengalami peningkatan sebesar 7,36 %. Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat sebesar 4,18%. Jumlah anggota koperasi menunjukkan kenaikan sebesar 1,74%. Jumlah tenaga kerja di bidang koperasi (manajer dan karyawan) periode tahun 2013 – 2014 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,18 % manajer dan 5,47 %.

Tabel 3.6
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Utara

No	Sektor	jumlah (unit)	
		2013	2014
1	Jumlah UKM	3.065.731	2.855.399
2	Serapan Tenaga Kerja	4.950.955	4.282.098

Sumber : Dinas Koperasi dan Ukm Provsu

Jumlah UKM di Sumatera Utara periode 2013 – 2014 mengalami penurunan sebesar 6,86%. Penyerapan tenaga kerja di sektor UKM ini juga mengalami penurunan sebesar 13,51%. Penurunan jumlah usaha kecil dan menengah serta serapan tenaga kerja ini disebabkan oleh data jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2013 masih termasuk jumlah data usaha besar sedangkan pada tahun 2014 data usaha besar sudah dipisahkan. Apabila dilihat dari jumlah tahun 2013 sebesar 2.823.210 unit, jumlah mengalami pertumbuhan sebesar 1,14%, serta jumlah serapan tenaga kerja tahun 2013 sebesar 4.234.802 mengalami pertumbuhan sebesar 1,11%. Hal ini merupakan pertanda positif jika dilihat bahwa keberadaannya merupakan persemaian usaha baru dan pengembangan kewirausahaan pada masyarakat di berbagai lapisan. Banyak UMKM yang masih bisa tumbuh atas upaya dan inisiatif sendiri, meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya.

9. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.625.000,- untuk tahun 2015 setelah melakukan survei kebutuhan hidup layak, dan dalam rangka menekan angka pengangguran telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelatihan keterampilan tenaga kerja institusional yang dilaksanakan di UPT BLK Pematangsiantar terhadap 32 orang peserta. Outcome dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenagakerja berbasis keahlian formal yang diharapkan dapat berusaha sendiri.

- b. Pelatihan keterampilan tenaga kerja non institusional yang dilaksanakan di UPT BLK Pematangsiantar terhadap 160 orang. Outcome dari kegiatan ini adalah terlatihnya tenaga kerja berbasis masyarakat yang diharapkan dapat membuka usaha sendiri.
- c. Pelatihan kewirausahaan produktif yang dilaksanakan di Kabupaten Karo, Kota Medan dan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan jumlah peserta 200 orang. Outcome dari kegiatan ini adalah terciptanya wirausaha baru yang mandiri sehingga angka pengangguran dapat dikurangi.
- d. Rekrutment fasilitasi magang ke Jepang yang dilaksanakan di Kota Medan. Outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya rekrutmen tenaga kerja yang akan dilatih di Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Cheves Bogor Jawa Barat yang selanjutnya akan dikirim untuk magang ke Jepang sebanyak 198 orang yang meningkatkan kompetensi tenaga kerja bersertifikat internasional dan meningkatkan devisa negara.
- e. Padat karya infrastruktur yang dilaksanakan di 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Selatan, Humbang Hasundutan, Samosir, Deli Serdang dan Langkat. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja sebanyak 540 orang dan terlaksananya pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian daerah tersebut.
- f. Penanganan kasus ketenagakerjaan yang dilaksanakan diseluruh Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menekan angka kasus ketenagakerjaan sehingga tercipta kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara yang kondusif.

- g. Pelatihan teknis berwirausaha bagi warga transmigrasi dengan komoditi perkebunan dan perikanan. Outcome dari kegiatan ini adalah terlatihnya warga transmigrasi sehingga meningkatnya perekonomian daerah transmigrasi dengan terciptanya wirausaha baru.
- h. Penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang diterima oleh Gubernur Sumatera Utara dalam rangka Pencapaian Pembinaan K3 di Provinsi Sumatera Utara terbaik kedua nasional.

Tabel 3.7
Jumlah Angkatan Kerja

No	Data	Tahun	
		2013	2014
1	Angkatan Kerja	6.314.239	6.272.083

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu

Tabel 3.8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

No	Data	Tahun	
		2013	2014
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,67 %	67,07 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu

Tabel 3.9
Angkatan Kerja Kategori Bekerja, Mencari Kerja dan Tidak Bekerja

No	Data	Tahun	
		2013	2014
1	AK Bekerja	4.460.690	5.881.371
2	AK Mencari Kerja	1.853.549	2.443.885
3	AK Tidak Bekerja	412.000	390.712

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu

10. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, maka dikondisikan stock pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 (tiga) bulan kebutuhan pangan penduduk. Bila dibandingkan jumlah surplus yang tersedia dengan kebutuhan untuk tiga bulan sebesar 442.348 ton maka sangat dibutuhkan cadangan pangan. Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen.

Tabel 3.10
Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2013 – 2014

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Total
1	Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	36 unit	30 unit	66 unit
2	Cadangan Pangan Pemerintah	66,0	-	66,0 ton beras

Sumber : Badan Ketahanan Provsu

Ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami penurunan dari 2.299.162 ton tahun 2013 menjadi 2.276.815 ton tahun 2014, terjadi penurunan produksi sebesar 22.347 ton, hal ini disebabkan masih terjadinya penurunan luas panen padi selama tahun 2014, tetapi bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2014 sebesar 1.769.393 ton, masih terdapat surplus sebesar 406.452 ton.

Beberapa produksi komoditas penting antara lain : produksi jagung 1.183.012 ton pada tahun 2013 menjadi 1.159.698 pada tahun 2014. Dilihat dari ketersediaan bahan pangan, ketersediaan komoditi pangan yang surplus selama tahun 2013 – 2014 adalah ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe merah.

Progres/perkembangan swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2013 – 2014 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari hasil perimbangan swasembada beras tahun 2014 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 121,73 % yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 21,73% per kapita. Ketersediaan beras sebesar 156,46 Kg/Kapita/Tahun (hanya berasal dari produksi lokal), bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 128,53 Kg/Kapita/Tahun, hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada perdagangan/pengiriman keluar daerah maka Sumatera Utara sudah memenuhi kebutuhan beras penduduknya.

Sementara Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dengan sasaran akhir penurunan konsumsi beras 1,5 % pertahun (Pergub No. 41 Tahun 2010) dan pencanangan gerakan menurunkan konsumsi beras dengan menetapkan "satu hari tanpa nasi" (*one day no rice*) yang implementasinya 1 hari dalam 1 minggu yaitu setiap hari selasa, tidak mengkonsumsi nasi yang berasal dari beras dan

dapat digantikan dengan sumber pangan dari karbohidrat lainnya non beras non terigu (Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 501/1508/Tahun 2014).

Tabel 3.11
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras
di Sumatera Utara Tahun 2013 – 2014

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
Jumlah Penduduk (jiwa)	13.215.401	14.551.960*
Kebutuhan Beras (ton)	1.867.441	1.870.363
Produksi Beras (ton)	2.299.162	2.276.815
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	431.721	406.452
% SSB	123,12	121,73

*Ket : *) jumlah penduduk bersumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provsu

11. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan data perkembangan jumlah sarana angkutan darat untuk wilayah pelayanan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), yang izinnnya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, tercatat menunjukkan trend peningkatan. Berdasarkan data tahun 2008 s.d 2013 trend pertumbuhan jumlah sarana angkutan rata-rata pertahunnya sebesar 15,60 %. Pada tahun 2014 jumlah sarana angkutan darat dalam Provinsi Sumatera Utara meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 15,30 % atau bertambah sebanyak 226 unit kendaraan.

Tabel 3.12
Trend Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Darat
(Antar Kota Dalam Provinsi) di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Dalam Trayek				Non Trayek		Jumlah	% Pertumbuhan
	MPU	Bus	AJDP	Bus Bandara	Taksi Bandara	Cara Sewa		
2008	434	427	-	-	-	-	861	
2009	722	595	-	-	-	-	1.317	52,96
2010	665	535	-	-	-	-	1.200	-8,88
2011	689	659	26	-	-	-	1.374	14,50
2012	652	641	66	-	-	-	1.359	-1,09
2013	535	660	108	13	273	49	1.638	20,53
2014	720	739	99	33	243	30	1.864	13,80

Berdasarkan realisasi jumlah penumpang pada tahun 2014 yang menggunakan angkutan umum jenis pelayanan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) tercatat sebanyak 11.815.000 orang, dengan rincian yang menggunakan kendaraan jenis MPU sebanyak 7.679.750 orang dan jenis bus sebanyak 4.135.250 orang. Jumlah pergerakan penumpang terbesar masih didominasi di wilayah Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang).

12. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada publik melalui website www.sumutprov.go.id.
- b. Jumlah Pameran atau Expo yang dilaksanakan pertahun, tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 1 kali yaitu : Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

- c. Publikasi/prestasi/inovasi pemerintah tahun 2013 dan tahun 2014 :

Tabel 3.13
Prestasi Dinas Kominfo Provsu TA. 2013 dan Tahun 2014

NO	HASIL-HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
Tahun 2013		
1	Juara 1 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2013 Oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam rangkaian Festival Pekan Informasi Nasional tahun 2013 yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara
Tahun 2014		
1	Juara 3 Festival Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun 2014 Oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI.	Diserahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam rangkaian Festival Pekan Informasi Nasional tahun 2014 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat.
2	Gubernur Sumatera Utara sebagai Kepala Daerah Yang Inovatif Tahun 2014.	Diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri di Solo.

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

- d. Cakupan pengembangan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan tahun 2013 dan tahun 2014 adalah 7,91 % untuk tingkat kecamatan di 7 kabupaten/kota (Langkat, Karo, Batu Bara, Labuhanbatu, Padangsidempuan, Tapanuli Utara dan Samsir).
- e. Hal-hal lain yang perlu dilaporkan menyangkut pelaksanaan tugas yang mencerminkan perbaikan kinerja yaitu :
- 1) Peningkatan SDM bagi pegawai.
 - 2) Fasilitasi kendaraan Dinas untuk kelancaran operasional untuk masing-masing bidang.
 - 3) Operasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

13. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Secara singkat capaian kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Penataan rasionalisasi UPT Dinas / Badan Provinsi Sumatera Utara :
 - 1) Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjungbalai, Asahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
 - 2) Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPT KPHL Model Unit XXII Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

- b. Persiapan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
 - 1) Memberikan pemahaman terhadap aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan aparatur pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara yang bertugas di bagian kelembagaan atas regulasi perubahan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain :
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
- 2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi berupa konsultasi, bimtek dan sosialisasi tentang Regulasi Perubahan dari Revisi PP No. 41 Tahun 2007;
 - 3) Memberikan petunjuk kepada pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- c. Penyerasian tupoksi organisasi perangkat daerah lembaga lain Provsu.
- Sebagai amanah peraturan perundang-undangan dan adanya urusan pemerintahan umum lainnya yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu dilakukan penyerasian dan penyesuaian terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan merubah/ merevisi :
- 1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.
- d. Penataan penyerasian/penyesuaian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kepentingan nasional.
- Hasilnya berupa pemahaman dan pembinaan yang dilakukan dengan cara fasilitasi, bimtek dan sosialisasi dan membuat Surat Pemberitahuan kepada Sekjen Kemendagri RI c/q. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemendagri perihal Penyerasian dan

Penyesuaian Nomenklatur Organisasi Nomor 060/4168 tanggal 6 Mei 2014.

- e. Persiapan penataan ULP Provinsi Sumatera Utara
Telah disusun dan dipersiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, Biro Organisasi Setdaprovsu telah melaksanakan beberapa upaya, antara lain :
 - 1) Melaksanakan Bimtek Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Publik), dan survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada tahun anggaran 2012, 2013 dan 2014.
 - 2) Menyelesaikan sosialisasi, sistem manajemen mutu/ISO 9001;2008 pada tahun anggaran 2013 dengan Narasumber dari Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Jakarta dan Konsultan dari PT. QIMS Medan.
 - 3) Untuk mempercepat penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) telah dilaksanakan asistensi dengan memanggil SKPD/Unit Kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- g. Dalam rangka pembinaan, inventarisasi dan penataan terhadap jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota telah dilaksanakan pembinaan berupa monitoring ke 20 kabupaten/kota, antara lain : Kabupaten Labuhanbatu, Simalungun, Asahan, Karo, Toba Samosir, Kota Tanjungbalai dan Pematangsiantar dengan hasil tersusunnya buku Pedoman Jabatan Fungsional Umum.

- h. Telah dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja para Pimpinan SKPD dengan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2014 yang pelaksanaannya pada tanggal 26 Agustus 2014 di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara dan telah ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Pemprovsu Tahun 2014, dan dokumen tersebut telah disampaikan ke Presiden RI melalui Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Provsu.
- i. Telah disusun Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/629/KPTS/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Tim Evaluasi terhadap Kontrak Kinerja para Kepala SKPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemprovsu Tahun 2014-2018, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/9311/2014 tanggal 9 September 2014 tentang tindaklanjut pelaksanaan kontrak kinerja kepala SKPD dan unit organisasi di lingkungan Pemprovsu dan Tim telah melaksanakan rapat intern sebanyak 2 (dua) kali yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dengan hasil rapat adalah akan melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2015.
- j. LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 telah mendapat peringkat berdasarkan Surat Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/3866/M.PAN-RB/11/2013 tanggal 22 November 2013 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai 53,11 dengan predikat penilaian "CC" dan diberikan Piagam Penghargaan dari Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI.

- k. LAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah mendapat peringkat berdasarkan Surat Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/3382/M.PAN-RB/09/2014 tanggal 18 September 2014 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat nilai 57,13 dengan predikat penilaian "CC" dan diberikan Piagam Penghargaan dari Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum SetdaprovSU antara lain sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provsu dengan melahirkan 37 Ranperda baik usulan dari PemprovSU maupun usulan dari DPRD Provsu.
- b. Bertambahnya jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota yang terkoordinasi, terarah, sistematis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya penegakan hak asasi manusia dengan dilaksanakannya kegiatan lokakarya dan pelatihan RANHAM daerah kabupaten/kota yang diikuti oleh 33 orang peserta dari kabupaten/kota.
- d. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diikuti oleh 60 orang peserta dari SKPD provinsi dan kabupaten/kota.
- e. Bertambahnya jumlah aparatur petugas penyuluh hukum dengan dilaksanakannya kegiatan bimbingan petugas penyuluh hukum yang diikuti oleh 60 orang peserta dari SKPD Provinsi dan kabupaten/kota.

- f. Meningkatkan pelayanan hukum secara lebih cepat, mudah dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh keadilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membantu masyarakat miskin memperoleh keadilan.
- g. Meningkatkan sumber daya manusia terhadap aparatur pemerintah dalam rangka penanganan perkara baik perdata maupun perkara tata usaha negara di pengadilan dengan dilaksanakannya kegiatan pertemuan koordinasi teknis kuasa hukum pemerintah daerah untuk penanganan perkara di peradilan sebanyak 33 orang peserta dari provinsi dan kabupaten/kota, sehingga aparatur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota semakin terlatih dalam menghadapi gugatan dan penanganan perkara di Pengadilan.
- h. Meningkatkan kualitas aparatur dalam rangka pembuatan kontrak/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain (pihak ketiga).
- i. Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan/pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota se Sumatera Utara yang diikuti peserta sebanyak 40 orang dari provinsi dan kabupaten/kota.

Capaian pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2014 antara lain :

a. Sistem Inovasi Daerah

Sejak tahun 2012 Balitbang Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Tim Koordinasi SIDA dan Tim Kelompok Kerja SIDA

yang bertujuan untuk membentuk dan penguatan Sistem Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini yaitu : Provinsi Sumatera Utara mendapat Anugerah Iptek Pemerintah Provinsi (BUDHIPURA) Bidang Penguatan jaringan Iptek Tahun 2014. Anugerah Iptek ini diberikan kepada pemerintah daerah provinsi atas dasar kepeduliannya terhadap implementasi Sistem Inovasi Daerah di dalam wilayahnya yang membawa kepada peningkatan ekonomi masyarakat dan jejaring iptek sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah.

Anugerah tersebut diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Boediono pada acara puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HARTEKNAS) ke – 19 Tahun 2014 di Gedung Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014.

b. Sentra HKI Lotus Balitbang Provsu

Balitbang Provsu mendapat fasilitas pembentukan dan penguatan Sentra HKI yang bersumber dari dana Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sentra HKI Lotus Balitbang Provsu bertugas mensosialisasikan HKI dan memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dari Sumatera Utara kepada Ditjen. HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun prestasi yang dicapai antara lain :

- 1) Mendaftarkan Paten Sederhana "Detektor Keamanan Menonton Televisi" dengan Inventor Jaka Suprana.

- 2) Cipta yakni Aplikasi Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting Versi 17 dengan inventor Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si, Ak.
 - 3) Pendaftaran Merek yaitu :
 - “Jael is Kenite” dengan pemilik merek Lisen Sitorus.
 - “Horo Aura” dengan pemilik merek Dwi Femi Nasution, SH.
 - “BandraQ 354” dengan pemilik merek inventor Jamaiah.
 - 4) Hak Cipta Yaitu : “STMIK Triguna Dharma” dengan inventor Muhammad Dahria.
 - 5) Hak Paten Yaitu :
 - “Cokelat chocopalm” dengan inventor Witjaksana Darmosarkoso dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
 - “Bolu elaeis” dengan inventor Witjaksana Darmosarkoso dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
 - “Compressed BioGas (CBG) Sawit” dengan inventor Witjaksana Darmosarkoso dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- c. Melaksanakan kerjasama penelitian dengan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bidang HAM dengan judul penelitian “Kajian Perlindungan Atas Hak-Hak Narapidana Selama Mendekam Dalam Lembaga Perasyarakatan di Sumatera Utara”.

Tabel 3.14
Penelitian Yang Dilaksanakan Selama Tahun 2014

No	Bidang	Judul
1	Pemerintahan dan Masyarakat	Kajian Pengaruh Potensi Fiskal dan Kebutuhan Fiskal Dalam Model Penyusunan Alokasi Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara
		Kajian Perlindungan Atas Hak-Hak Narapidana selama mendekam dalam Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara
2	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Identifikasi Potensi Peluang Ekspor Komoditi Unggulan Daerah di Sumatera Utara
		Evaluasi Sistem Irigasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan di Sumatera Utara
		Kajian Model Informasi Pasar Buah - buahan di Sumatera Utara
3	Bidang Sosial Budaya	Peningkatan Pemberdayaan Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pendidikan (Jarlitbangdik) Sumatera Utara
		Kajian Distribusi Guru di Sumatera Utara
		Penelitian Hak Kesehatan Anak di Wilayah Pesisir Sumatera Utara
4	Sumber Daya Alam dan Maritim	Kajian Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Energi di Sumatera Utara
		Kajian Peran Sektor Pertambangan dalam upaya menuju Konvergensi Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu

Kinerja DPRD Provsu berupa produk hukum, yaitu keputusan DPRD pada tahun 2013 sebanyak 21 keputusan, dan pada tahun 2014 sebanyak 29 keputusan. Fasilitasi rapat-rapat DPRD pada tahun 2013 sebanyak 368 kali, dan pada tahun 2014 sebanyak 352 kali.

Fasilitasi pendukung tugas-tugas DPRD lainnya pada tahun 2013 sebanyak 4 kali terdiri dari 3 kali reses dan 1 kali kunjungan kerja ke kabupaten/kota, dan pada tahun 2014 sebanyak 4 kali

terdiri dari 3 kali reses dan 1 kali kunjungan kerja ke kabupaten/kota.

Gambaran umum kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan,
Pendidikan dan Jenis Kelamin

Golongan	Tahun 2013	Tahun 2014
I	276	238
II	3.228	2.863
III	7.523	7.744
IV	902	988
Jumlah	11.929	11.833
Pendidikan	Tahun 2013	Tahun 2014
SD	241	276
SLTP	353	362
SLTA	5.200	4.719
D-3	1.021	916
S-1	4.319	4.606
S-2	788	937
S-3	7	17
Jumlah	11.929	11.833
Jenis Kelamin	Tahun 2013	Tahun 2014
Pria	7.411	7.245
Wanita	4.518	4.588
Jumlah	11.929	11.833

Ket : Keadaan Desember 2014

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Tabel 3.16
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural,
Fungsional/Staff

Pejabat Struktural	Tahun 2013	Tahun 2014
I	1	-
II	52	58
III	352	369
IV	820	915
Fungsional	1.638	1.620
Staf	9.066	8.871
Jumlah	11.929	11.833

Ket : Keadaan Desember 2014

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Penyelesaian proses pensiun PNS :

Tahun 2013 : 543 orang

Tahun 2014 : 25 orang

Penyelesaian permasalahan kepegawaian (pelanggaran disiplin) :

Tahun 2013 : 4 orang

Tahun 2014 : 6 orang

Jumlah mutasi kepegawaian dalam pangkat dan jabatan :

a. Mutasi Kepegawaian dalam Pangkat

Tahun 2013 : 6.037 orang

Tahun 2014 : 4.072 orang

b. Mutasi Kepegawaian dalam Jabatan

Tahun 2013 : 724 orang

Tahun 2014 : 307 orang

Hal-hal lain yang perlu dilaporkan menyangkut pelaksanaan tugas yang mencerminkan perbaikan kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Seleksi Praja IPDN

Dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing dan memiliki SDM yang handal, Pemprovsu telah melaksanakan seleksi Praja IPDN bagi putra/putri kabupaten/ kota se Sumatera Utara, pada pelaksanaan seleksi tahun ini, jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 904 peserta, dan setelah dilaksanakan test peserta yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 98 orang.

b. Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS.

Seluruh usul kenaikan pangkat PNS Pemprovsu dan kabupaten/ kota se Sumatera utara telah diproses sesuai dengan prosedur dan tepat waktu.

c. *Training Capacity Building and Team Work.*

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Badan Kepegawaian Daerah Provsu untuk melakukan penyegaran bagi Pejabat Struktural Eselon II dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya mengemban visi dan misi Provinsi Sumatera Utara di bidang pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya sebanyak 61 orang Pejabat Eselon II di lingkungan SKPD Pemprovsu telah mengikutinya serta dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

d. Tes urine bagi Pejabat Struktural di lingkungan unit kerja Pemprov

Kegiatan ini dalam rangka pencegahan keterlibatan PNS menggunakan narkoba, maka telah dilakukan kerjasama antara Pemprov dengan BNN Provsu untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap PNS/Pejabat di lingkungan Pemprov sebanyak 1.384 orang.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 Tentang penghapusan denda pajak dan gratis BBN Kendaraan bermotor.
- b. Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak melalui pengoperasian gerai Samsat dan Samsat Online.

Secara umum langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup baik terhadap pendapatan daerah.

Tabel 3.17
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 - 2014

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	9.125.861.056.699,00	7.625.027.273.017,79	83,69
2014	8.645.503.818.005,00	7.770945.982.035,42	89,88

Sumber : Dinas Pendapatan Provsu

14. Urusan Wajib Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012, jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran pelayanan sosial ada 26 jenis berubah dari sebelumnya yang berjumlah 22 jenis. Pertambahan jenis PMKS berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini, meliputi PMKS pemulung, korban trafiking, kelompok minoritas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan anak dengan kedisabilitas.

Yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah :

- a. Penanganan warga/kelompok masyarakat yang dikategorikan PMKS
- b. Mendorong dan memperkuat PSKS yang tumbuh dari individu dan komunitas masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penanganan PMKS meliputi :

- a. Bidang rehabilitasi sosial.
- b. Bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- c. Bidang potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- d. Bidang pemberdayaan sosial.

Pada tahun 2014 penanganan tersebut diberikan kepada 3.835 orang sistim Panti dan 4.777 orang dengan sistim Non Panti. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah difasilitasi untuk memperoleh bantuan sosial pada tahun 2013 dan tahun 2014 meliputi :

- a. Sistim Panti Tahun 2013 sebanyak 2.027 orang.
- b. Sistim Panti Tahun 2014 sebanyak 3.835 orang.

- c. Sistim Non Panti Tahun 2013 sebanyak 7.689 orang.
- d. Sistim Non Panti Tahun 2014 sebanyak 4.777 orang

15. Urusan Wajib Kebudayaan

Adapun capain kinerja di bidang kebudayaan antara lain sebagai berikut :

- a. Pendukungan pelaksanaan Festival Danau Toba yang merupakan *Cove Event* yang dilaksanakan setiap tanggal 7-11 September setiap tahunnya sebagai promosi budaya Sumatera Utara untuk mendukung pembangunan pariwisata di Sumatera Utara, dalam kegiatan Festival Danau Toba tersebut diharapkan jumlah kunjungan wisata mancanegara dan nusantara ke Sumatera Utara meningkat.
- b. Pengiriman Tim Kesenian Sumatera Utara Tingkat Nasional (Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 Mei, Surabaya 9 s/d 12 Oktober, dan Bandar Lampung 22 s/d 25 Agustus), di Papua 10 s/d 13 September. Adapun hasil yang dicapai sebagai ajang promosi budaya Sumatera Utara agar dikenal luas di luar Provinsi. Disamping itu sekaligus memberdayakan, melaksanakan, pembinaan para seniman agar semakin produktif dan menghasilkan karya seni dan mampu bersaing dengan provinsi lain ditingkat nasional. Kekayaan seni budaya Sumatera Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai karya seni yang berkualitas dan sangat potensial untuk ikut mengambil peran dalam percaturan industri kreatif dan perkembangan global.

- c. Pelaksanaan kegiatan workshop seni sastra pada tanggal 23 April 2014 dan 13 November 2014, pagelaran seni tari, teater, musik tanggal 18 April dan 13 Agustus 2014 di Taman Budaya Sumatera Utara yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seniman untuk menampilkan, mempergelarkan hasil karyanya sehingga masyarakat dapat menyaksikan yang berdampak meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat khususnya generasi muda.
- d. Pameran rutin dan pameran seni rupa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 29 Maret 2014 di Taman Budaya, diharapkan hasil yang dicapai untuk meningkatkan daya klasifikasi dan apresiasi seni khususnya seni lukis kepada pecinta seni sehingga mampu menghasilkan karya-karya seni rupa yang berkualitas dan bernilai ekonomis.
- e. Pawai Seni dan Budaya Nusantara merupakan kegiatan tahunan seni pertunjukan Indonesia. Pawai ini diselenggarakan dalam rangkaian perayaan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan pawai ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni masyarakat Indonesia, terciptanya gelombang kreatif di daerah untuk mewujudkan karya berdaya saing ditingkat nasional, dan terciptanya event yang menjadi ikon ekonomi kreatif seni pertunjukan untuk daya tarik pariwisata. Melalui kegiatan ini setiap provinsi diharapkan dapat menampilkan potensi budaya, keunikan adat istiadat masing-masing daerah yang dikreasikan dalam bentuk tari, musik dipadukan dengan kostum dan properti yang dipertunjukkan di depan Bapak Presiden, dan tamu kehormatan, serta masyarakat luas. Hasil yang diharapkan adalah menumbuhkan kecintaan

generasi muda terhadap seni dan budaya tradisi Indonesia agar seni dan budaya Indonesia tetap dapat hidup dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pendukungnya.

- f. Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara (GBN) adalah sebuah wadah guna menyalurkan bakat dan potensi kreativitas di bidang seni suara dan seni musik. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan apresiasi generasi muda dibidang seni musik dan terciptanya gelombang kreatif di daerah untuk mewujudkan karya berdaya saing ditingkat nasional. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengikuti Gita Bahana Nusantara Tahun 2014 di Jakarta dan kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap yakni mulai dari audisi bagi para pelajar dan alumni Gita Bahana Nusantara yang dilaksanakan di Kota Pematangsiantar tanggal 4 s/d 5 Juni 2014, dan pengiriman ke Jakarta untuk mengikuti Karantina Gita Bahana Nusantara pada tanggal 1 s/d 19 Agustus 2014. Peserta Gita Bahana Nusantara dari Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 4 orang pelajar yang di audisi di Kota Pematangsiantar, dan akan dikarantina bersama peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2014 ini adalah menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap lagu kebangsaan Indonesia agar lagu-lagu kebangsaan Indonesia tetap dapat hidup dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pendukungnya.
- g. Festival Film Pendek diharapkan dapat menjadi wadah bagi seniman – seniman Sumatera Utara khususnya seni peran dan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi

perkembangan, kemajuan dan peningkatan kreativitas dunia seni peran di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Festival Film Pendek dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 3 Desember 2014 di Medan. Peserta Film Pendek terdiri dari para komunitas film dan pelajar yang ada di Sumatera Utara. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Festival Film Pendek ini adalah menjadikan film sebagai sarana belajar dari masyarakat serta mendorong masyarakat untuk mencintai seni, budaya dan film Indonesia.

h. Festival Budaya Sumatera Utara

Kegiatan ini merupakan salah satu visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melestarikan budaya Sumatera Utara sebagai daerah budaya dan tujuan wisata andalan, demikian juga program pemerintah pusat yang telah menetapkan Sumatera Utara sebagai kawasan strategi nasional. Festival budaya Sumatera Utara ini sangat strategis dalam memelihara, menumbuh kembangkan, melestarikan dan menanamkan nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa, sekaligus sebagai salah satu dari pilar utama dari *National Character Building*, dalam membentuk generasi penerus bangsa yang bermartabat, berbudi luhur, serta penuh tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Festival Budaya Sumatera Utara dilaksanakan di Merdeka Walk Medan pada tanggal 11 s/d 13 September 2014. Peserta terdiri dari 5 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

16. Urusan Wajib Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perpustakaan, dilakukan peningkatan kinerja urusan wajib perpustakaan, dengan tujuan peningkatan minat baca dan pembinaan perpustakaan, kepuasan pemakai menjadi tujuan dalam layanan perpustakaan, sehingga kelengkapan koleksi dan sarana layanan yang memadai menjadi unsur yang paling penting

Tabel 3.18
Gambaran Umum Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2013	Tahun 2014
a	Pertambahan koleksi buku di perpustakaan daerah	699.204 eksemplar	713.633 eksemplar
b	Peningkatan Pengunjung ke perpustakaan daerah	99.771 orang	62.041 orang
c	Peningkatan minat baca terhadap koleksi buku di perpustakaan daerah	199.542 orang	132.760 orang
d	Peningkatan Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah	88.694 judul	91.285 judul
e	Ketersediaan e-book di perpustakaan daerah	1650 keping	1700 keping

Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Jumlah pertambahan koleksi buku di Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dari tahun 2013 ke 2014 mengalami kenaikan sebesar 14.429 eksemplar. Jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah Sumatera Utara selama 2014 mengalami penurunan sebesar 37.730 orang. Hal ini disebabkan adanya pembangunan gedung kantor perpustakaan baru dan rehabilitasi gedung perpustakaan lama sehingga pelayanan di perpustakaan untuk sementara ditiadakan sampai proses pembangunan perpustakaan itu selesai.

Ini juga mempengaruhi dengan tingkat minat baca terhadap koleksi buku di perpustakaan daerah. Minat baca terhadap koleksi buku di perpustakaan daerah juga mengalami penurunan sebesar 66.782 orang. Perhitungan ini dilihat dari jumlah buku yang dibaca atau dipinjam oleh pengunjung yang datang ke perpustakaan daerah. Pengadaan buku dan e-book tetap diadakan agar koleksi buku di perpustakaan daerah tetap bertambah setiap tahunnya. Koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah bertambah sebesar 2.591 judul dan e-book bertambah sebanyak 100 keping.

Upaya meningkatkan minat baca masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara yaitu kegiatan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2014 di Aula Digital Library Unimed, Medan, dihadiri 75 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pendiri dan masyarakat anggota Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap agar tokoh masyarakat, pendiri dan anggota Taman Bacaan Masyarakat (TBM) termotivasi untuk menyebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat arti pentingnya membaca untuk membangun budaya baca masyarakat.

Untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik Desa/Kelurahan Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Juli 2014 di Hotel Madani, Medan. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kinerja perpustakaan desa/kelurahan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pedesaan, memacu kreativitas dan memotivasi para pengelola perpustakaan desa/kelurahan agar dapat memenuhi standar perpustakaan umum desa/kelurahan yang bermutu dan berkualitas. Sebagai juara pertama diraih Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Posisi kedua diraih Perpustakaan Labuhan Haji, Kualuh Hulu-Labuhanbatu Utara. Dan juara ketiga diraih oleh Perpustakaan Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Medan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengadakan kegiatan Lomba Taman Bacaan Masyarakat Terbaik (TBM) Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 s/d 6 Agustus 2014 di Hotel Madani. Tujuan dari kegiatan ini memberikan motivasi kepada pengelola Taman Bacaan Masyarakat agar dapat mengembangkan perpustakaan umum di masyarakat. Juara pertama diraih oleh TBM Rumah Pintar Padang Halaban Labuhanbatu Utara, juara kedua diraih oleh TBM Aisyah Az-Zahra Medan dan juara ketiga diraih oleh TBM An-Nur Binjai.

Untuk meningkatkan kualitas perpustakaan dan SDM sebuah perpustakaan, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara menggelar Lomba Pustakawan Teladan Sumatera Utara 2014, dilaksanakan di Hotel Madani, Medan pada tanggal 11 s/d 12 Agustus 2014 dan sebagai juara pertama direbut oleh Reni Inggit Pratiwi, Pustakawan Labuhanbatu Selatan, juara kedua diraih oleh Rika Marissa Sebayang, pustakawan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, dan juara ketiga diraih oleh Melisa Elisabet Hutabarat, pustakawan

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah memacu kreativitas dan motivasi bagi pustakawan untuk meningkatkan kompetensinya, menjadi contoh teladan bagi pustakawan yang ada di Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas perpustakaan mereka masing-masing.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Total produksi perikanan Sumatera Utara meningkat 3,5% pada tahun 2014 sebesar 773.28,8 ton, jika dibandingkan dengan total produksi perikanan Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 747.067 ton. Hasil ini disebabkan adanya peningkatan produksi penangkapan ikan di laut dan usaha budidaya. Hasil penangkapan ikan pada tahun 2013 sebesar 553.311,00 ton dan produksi perikanan tangkap di laut meningkat 2,74% menjadi 568.484,6 ton pada tahun 2014. Penangkapan ikan di perairan umum meningkat 7,5 % pada tahun 2014, menjadi 50.471,7 ton, sedangkan produksi ikan di perairan umum tahun 2013 adalah sebesar 46.950,4 ton. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 204.744,2 ton, dimana terjadi peningkatan 5.67% dari produksi perikanan budidaya tahun 2013 sebesar 193.756.6 ton.

Tabel 3.19
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara
Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014

No	Rincian	Potensi	Produksi 2013	Produksi 2014	Peningkatan (%)
1	perikanan tangkap		553.311	568.484,6	2,74
	a. penangkapan di laut	840.200 ton/thn	508.360	515.325,2	1,37
	b. penangkapan di perairan umum	155,797 ton/thn	46.950,4	50.471,7	7,5
2	perikanan budidaya	138.647,5 ha	193.756,60	204.744,2	5,67
	a. budidaya tambak	20.000 ha	32.658,5	29.324,2	10,21
	b. budidaya air laut	100.000 ha	6.628,90	4.348,1	34,41
	c. budidaya air tawar	18.647,5 ha	154.469,2	171.071,8	10,71
total			747.067,00	773.228,8	3,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan 2,0 % pada tahun 2014 dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013. Pada tahun 2013 ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Utara sebesar 56.185,92 kg dengan nilai U\$ 250.900.694,10, pada tahun 2014 ekspor hasil perikanan sebesar 57.314,05 dengan nilai U\$ 299.591,121,35. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2013 sebesar 38,95 kg/kapita/tahun, dan meningkat 2,95 % pada tahun 2014 menjadi 40,1 kg/kapita/thn. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sebesar Rp. 1.760.504.400,- dan meningkat 27% pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.239.533.600,-.

Tabel 3.20
Pencapaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2013 dan Tahun 2014

NO	RINCIAN	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014	PENINGKATAN
1	produksi perikanan tangkap	553.311,00 ton	568.484,6 TON	2,74 %
2	produksi perikanan budidaya	193.756,60 ton	204.744,2 TON	1,37 %
3	ekspor hasil perikanan	56.185,92 kg	57.314,05 KG	2,00 %
4	nilai ekspor hasil perikanan	US \$ 250.900.694,10	US \$299.591.121.35	19.40 %
4	tingkat konsumsi ikan kg/kapita/tahun	38,95	40,1	2,95 %
5	REALISASI PAD	RP. 1.760.504.400,-	RP.2.239.533.600,-	27,21 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

2. Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Indikator yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesejahteraan petani, antara lain : pendapatan, tingkat upah dan daya beli yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP), serta terbukanya akses bagi setiap pelaku usaha pertanian terhadap sumber daya produktif pertanian (modal, informasi, teknologi, lahan dan air).

NTP Sumatera Utara pada tahun 2014 sebesar 100,18 atau naik 0,69% bila dibandingkan dengan tahun 2013, namun bila dilihat dari NTPH (Nilai Tukar Petani Hortikultura) terjadi penurunan. Penurunan disebabkan oleh karena fokus kegiatan hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan masih di dataran tinggi terutama di Kabupaten Karo. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Karo sepanjang tahun 2014 terjadi erupsi Gunung Sinabung sehingga menyebabkan kerusakan tanaman hortikultura dimana

banyak tanaman yang rusak tidak dipanen dan sebagian yang tidak rusak namun tidak dapat berproduksi secara optimal.

Tabel 3.21
Perkembangan Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2013 Dan Tahun 2014

URAIAN	2013	2014*
Nilai Tukar Petani (NTP)	99,49	100,18
- Nilai tukar petani padi & palawija (NTPP)	99,46	99,54
- Nilai tukar petani hortikultura (NTPH)	103,4	98,14

Ket : *) Angka sementara

Sumber : Data BPS Provsu yang telah diolah

Tabel 3.22
Pencapaian Produksi Pangan

NO	URAIAN	2013	ASEM 2014	%-TASE
1	PADI			
	- Luas panen (ha)	742.968	716.654	(3,54)
	- Produktivitas (kw/ha)	50,17	50,64	0,94
	- Produksi (ton)	3.727.249	3.628.968	(2,64)
2	JAGUNG			
	- Luas panen (ha)	211.750	200.585	(5,27)
	- Produktivitas (kw/ha)	55,87	57,82	3,49
	- Produksi (ton)	1.183.011	1.159.698	(1,97)
3	KEDELAI			
	- Luas panen (ha)	3.126	5.024	60,72
	- Produktivitas (kw/ha)	10,33	11,36	9,97
	- Produksi (ton)	3.229	5.705	76,68
4	KACANG TANAH			
	- Luas panen (ha)	9.377	8.311	(11,37)
	- Produktivitas (kw/ha)	12,11	11,77	(2,81)
	- Produksi (ton)	11.351	9.778	(13,86)
5	KACANG HIJAU			

NO	URAIAN	2013	ASEM 2014	%-TASE
	- Luas panen (ha)	2.130	2.603	22,21
	- Produktivitas (kw/ha)	11,00	11,17	1,55
	- Produksi (ton)	2.344	2.907	24,02
6	UBI KAYU			
	- Luas Panen (HA)	47.141	42.049	(10,80)
	- Produktivitas (KW/HA)	322,06	328,88	2,12
	- Produksi (TON)	1.518.221	1.382.926	(8,91)
7	UBI JALAR			
	- Luas Panen (HA)	9.101	11.130	22,29
	- Produktivitas (KW/HA)	128,20	131,74	2,76
	- Produksi (TON)	116.671	146.622	25,67

Sumber : Dinas Pertanian Provsu

Berdasarkan angka sementara (ASEM) tahun 2014 bahwa produksi padi sebesar 3.628.968 ton atau turun sebesar 2,64% bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2013, hal ini disebabkan oleh karena di tahun 2014 terjadi anomali iklim yang menyebabkan kekeringan pada periode Januari-Mei 2014 sehingga di beberapa kabupaten/kota tidak dapat bertanam atau melakukan pergeseran tanam, hal ini berdampak pada pencapaian produksi yang telah ditetapkan sehingga target tanam maupun panen tidak dapat tercapai. Produksi jagung pada asem tahun 2014 turun sebesar 1,97%, hal ini disebabkan terjadinya kemarau dan pada beberapa kabupaten yang pertanaman jagungnya sebagai tanaman sela di areal perkebunan, sudah tidak bisa lagi bertanam. Produksi kedelai berdasarkan asem tahun 2014 naik sebesar 76,68 % hal ini disebabkan karena di Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai petani melakukan pergeseran tanam padi di sebahagian kecamatan mengalihkan ke komoditi kedelai.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pada triwulan III tahun 2014, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar 20,66%, sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhan sektor pertanian ini sebesar 21,32 %. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sangat terkait dengan seluruh aspek lingkup pertanian dan saat ini sektor industri yang berbasis pertanian pertumbuhannya cukup menggembirakan, sehingga kedepan pertanian harus didukung oleh industri hilir sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

3. Urusan Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.055.795$ Ha yang terdiri dari:

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA)/ Taman Buru, seluas ± 427.008 Ha.
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas $\pm 1.206.881$ Ha.
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 641.769 Ha.
- d. Kawasan Hutan Produksi (HPT) seluas ± 704.452 Ha.
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, seluas ± 75.684 Ha.

Luas lahan kritis Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 adalah 1.800.450,60 Ha yang terdiri dari Lahan sangat kritis 339.633,10 Ha dan kritis 1.460.817,50 Ha. Adapun penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

Untuk mengurangi dan memulihkan kondisi lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah telah melaksanakan program-program rehabilitasi hutan dan lahan yakni upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Untuk tahun 2013 total luas lahan yang telah direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 25.365,78 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 23.862,36 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 1.563,42 hektar. Sedangkan pada tahun 2014, total luas lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 142.100,06 hektar yang terdiri dari rehabilitasi di dalam kawasan hutan seluas 128.521,51 hektar dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan seluas 13.578,55 hektar.

Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Kegiatan reboisasi bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Realisasi pelaksanaan reboisasi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah seluas 5.318,86 ha dan pada tahun 2014 seluas 128.521,51 hektar. Dengan adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini diharapkan setiap tahunnya luas lahan kritis akan semakin berkurang dan bahkan memberikan dampak yang positif terhadap perubahan iklim. Demikian juga peranan swasta dalam mengelola hutan secara lestari dan berkesinambungan melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri pada areal-areal yang kurang produktif (bekas

perambahan, alang-alang, semak belukar, lahan kosong) yang berada dalam kawasan hutan telah turut mendukung upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Utara. Luas areal HTI di Propinsi Sumatera Utara seluruhnya berjumlah 370.647,66 Ha. Rencana penanaman HTI Tahun 2009 s/d 2013 pada IUPHHK-HTI di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 197.147,96 Ha dan realisasi penanaman HTI Tahun 2009 s/d 2013 seluas 88.539,61 Ha. Di tahun 2014 rencana penanaman HTI seluas 55.583,58 Ha dan realisasi penanamannya s/d triwulan III seluas 8.115,51 Ha.

Penghijauan adalah upaya merehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam-menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi sebagai unsur produksi dan sebagai media pengatur tata air yang baik serta upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya. Penghijauan lingkungan berupa penanaman pohon tanaman hutan dan MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) dilaksanakan di beberapa kabupaten dari sumber pendanaan Dana Sektoral Kehutanan (APBN), APBD Kabupaten dan DAK Kehutanan. Kegiatan penghijauan terdiri dari pembangunan hutan rakyat, pembangunan kebun bibit desa, pembuatan dam pengendali, pembuatan dam penahan, pembuatan *gully plug* dan sumur resapan. Pelaksanaan penghijauan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 terealisasi seluas 547,25 hektar pada 6 kabupaten meliputi Deli Serdang, Langkat, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan Nias, terdiri dari penanaman hutan rakyat sebanyak 160,00 ha, serta pembuatan dam pengendali sebanyak 2 unit, pembuatan dan penahan sebanyak 4 unit dan pembuatan sumur resapan sebanyak 20 unit. Sedangkan untuk tahun 2014, penghijauan di Provinsi Sumatera Utara terealisasi seluas 13 .578,55

hektar pada 23 kabupaten/kota meliputi Deli Serdang, Langkat, Karo, Dairi, Simalungun, Asahan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Sibolga, Tanjungbalai, dan Medan.

Pada tahun 2013, total produksi kayu bulat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 526.842,72 m³, yang terdiri dari 109.634,25 m³ kayu bulat; sebanyak 379.642,15 m³ kayu bulat sedang dan sebanyak 37.566,32 m³ kayu bulat kecil. Jenis kayu bulat yang diproduksi adalah meranti, pinus, rimba campuran, dll. Sedangkan untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2013 terdiri dari jenis plywood, sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp, S4S, meubel, veneer dan produk lainnya (yang merupakan turunan kayu lapis atau jenis produk lidi) dengan total volume produksi sebesar 440.048,00 m³ dan 73.408.384 keping. Pada tahun 2014, total produksi kayu bulat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.108.530,64 m³, yang terdiri dari kayu bulat hutan alam 443.913,27 m³; kayu bulat hutan rakyat (HR) 8.973,87 m³; kayu bulat hutan tanaman industri (HTI) 655.643,50 m³. Jenis kayu bulat yang diproduksi adalah meranti, pinus, rimba campuran, dll. Untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2014 terdiri dari plywood, sawn timber, block board, moulding, pulp, furniture, dan olahan lainnya dengan total volume produksi sebesar 471.921,84 m³ dan 100.602.598 keping.

Adapun produksi hasil hutan bukan kayu pada tahun 2013 adalah 25.488.490 kg. Produksi hasil hutan tersebut terdiri dari 60.387 kg getah pinus, sebanyak 3.435.183 kg getah karet dan sebanyak 21.992.920 kg sawit. Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari IUPHHK Hutan Tanaman yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhanbatu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara. Sedangkan produksi rotan pada tahun 2013 tidak terdata. Pada tahun 2014 produksi hasil hutan bukan kayu adalah 101.995.502,05 ton yang terdiri dari getah karet sebanyak 1.461.375,13 ton dan sawit sebanyak 100.534.126,92 ton.

Kawasan hutan yang sangat luas yang kita miliki saat ini sangat rentan oleh gangguan-gangguan baik itu oleh campur tangan manusia (kebakaran hutan) maupun kasus-kasus perambahan dan illegal logging. Peran serta masyarakat yang ada disekitar kawasan hutan sangat besar untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan dari gangguan-gangguan tersebut. Gangguan keamanan hutan yang ada termasuk perusakan hutan yang terjadi pada tahun 2013 adalah terjadinya perambahan dengan pemukiman liar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas areal yang dirambah 2.453 hektar dengan jumlah perambah yang terdata sebanyak 295 KK (1.107 orang). Perambahan hutan tersebut terjadi pada beberapa kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa dan areal IUPHHK hutan tanaman. Jenis gangguan keamanan hutan atau perusakan hutan lainnya yang

terjadi pada tahun 2013 adalah terjadinya perladangan liar pada beberapa kawasan hutan di Asahan, Karo, Samosir dan Labuhanbatu Utara serta pada beberapa kawasan hutan lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga total area perladangan liar pada tahun 2013 adalah seluas 34.650 ha dengan jumlah peladang liar yang terdata sebanyak 46 KK (58 orang). Sedangkan penebangan liar atau pencurian hasil hutan hanya terdapat di Kabupaten Karo dengan jumlah barang bukti sebanyak 305/ tunggak pohon.

Upaya penanganan terhadap *illegal logging* pada tahun 2013 dan tahun 2014 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET) dan Intelijen Tindak Pidana Kehutanan meliputi kerusakan, perambahan kawasan dan *illegal logging*. Dengan hasil yang dicapai diperoleh data dan keterangan terhadap pelaku perusakan dan perambahan kawasan hutan dan *illegal logging* di Kabupaten Langkat, Labuhanbatu Utara, Simalungun, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Utara.
- b. Melakukan patroli pada kawasan hutan yang rawan perusakan, perambahan kawasan hutan dan *illegal logging* dengan hasil yang di capai, berkurangnya potensi kerusakan dan perambahan kawasan hutan di Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tapanuli Utara.
- c. Melakukan operasi penindakan terhadap perambahan kawasan hutan dan *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Langkat, Labuhanbatu, Simalungun, dan Deliserdang. Dengan hasil yang dicapai berkurangnya perambahan kawasan hutan dan *illegal*

logging di kawasan hutan lindung panei Kabupaten Labuhanbatu, kawasan hutan tambak bawang Kabupaten Simalungun, kawasan hutan di Kabupaten Langkat.

- d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat kawasan hutan didaerah rawan konflik di Kabupaten Langkat, Simalungun, Toba Samosir, Karo, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Asahan dan Tapanuli Utara tentang fungsi kawasan hutan, pola pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat, dengan hasil yang di capai meningkatnya pengetahuan masyarakat sekitar kawasan hutan rawan konflik di Kabupaten Langkat, Simalungun, Toba Samosir, Karo, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Asahan dan Tapanuli Utara tentang fungsi kawasan hutan, pola pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat.
- e. Pemasangan plank larangan merambah kawasan hutan, degan hasil yang di capai masyarakat di sekitar kawasan di Kabupaten Langkat, Simalungun, Toba Samosir, Karo, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Asahan dan Tapanuli Utara mengetahui sanksi-sanksi hukum apabila melakukan perusakan, perambahan kawasan hutan.

Berbagai program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan fungsi kawasan hutan agar menjadi lebih produktif dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh Provinsi Sumatera Utara, antara lain melalui pekan penghijauan, Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon, aksi/gerakan penanaman serentak Indonesia dan pekan pemeliharaan pohon, Hari Menanam Pohon Indonesia (tanggal 28 Nopember) dan Bulan Menanam Pohon Nasional (bulan Desember), penanaman dalam rangka

Gerakan Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*), penanaman 1 milyar pohon (*One Billion Indonesia Trees for The World-OBIT*), pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) serta dalam rangka mengisi Tahun Kehutanan Internasional 2011. Realisasi penanaman 1 Milyar pohon (OBIT) pada Tahun 2010 telah berhasil menanam 40.262.039 batang (134,21% dari target 30.000.000 batang), Tahun 2011 sebanyak 75.031.602 batang (187,58% dari target 40.000.000 batang), Tahun 2012 sebanyak 77.442.612 batang (154,89 % dari target 50.000.000 batang), Tahun 2013 sebanyak 51.443.378 batang (102,88% dari target 50.000.000 batang) dan Tahun 2014 sebanyak 7.831.545 batang (15,66% dari target 50.000.000 batang). Adapun penyebab rendahnya realisasi di tahun 2014 dikarenakan banyak kabupaten/kota yang belum melaporkan realisasi OBIT daerah tersebut. Program OBIT didukung melalui kegiatan seperti Kebun Bibit Rakyat, Pembuatan Tanaman Reboisasi dan Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Toba Go Green di sekitar DTA Danau Toba yang pelaksanaannya dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I Bukit Barisan (Sampai dengan saat ini jumlah bibit yang ditanam disekitar DTA Danau Toba sebanyak 650.000 batang pohon yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kodim yang ada di Kabupaten sekitar DTA Danau Toba).

Dalam hal pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan atau untuk kepentingan yang bersifat penting dan strategis (pinjam pakai kawasan hutan) dapat dilakukan dengan prosedur izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 April 2011 tentang Prosedur Pinjam Pakai Kawasan Hutan Jo. Permenhut No. P.38/Menhut-II/2012 tanggal

28 September 2012 tentang Perubahan Permenhut P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Permenhut P.14/Menhut-II/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Perubahan Kedua Permenhut nomor : P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011. Selama tahun 2014 Kementerian Kehutanan telah menerbitkan sebanyak 3 (tiga) izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: (1). PLTM Lae Simbelin seluas 11,73 hektar oleh PT. Energi Mekar Lestari; (2). PLTM Sidikalang 2 seluas 14,9 oleh PT. Asri Power Kerta; dan (3). PLTM Sidikalang 1 seluas 9,2 hektar oleh PT. Asri Power Prada. Dalam pengawasan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah terbit, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara lain pada pemegang ijin PT. Agincourt Resources (Eksplorasi Emas) di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Utara tidak bisa dilepaskan dari sistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) PT. PLN (Persero). Tenaga listrik dipasok kepada masyarakat melalui sistem terintegrasi pembangkit, transmisi dan distribusi.

Beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara pada tahun 2013 dan 2014 sudah mencapai sekitar 1750 MW. Kondisi ini tidak dibarengi dengan daya mampu pasok yang hanya sekitar 1500 MW, sehingga terjadi defisit listrik sekitar 250 MW. Kondisi kelistrikan Sumatera Bagian Utara masih jauh dari kondisi ideal yaitu seharusnya memiliki cadangan listrik ideal 30 % dari beban puncak. Apabila beban puncak sistem Sumatera Bagian Utara sekitar 1750 MW maka seharusnya cadangan daya listrik sudah mencapai

sekitar 525 MW. Data Bank Indonesia pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,55 %. Jika pertumbuhan kebutuhan listrik optimistik Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada angka di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata yaitu sekitar 7 % maka kebutuhan listrik pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan 122,5 MW sehingga beban puncak listrik dapat mencapai angka sekitar 1872,5 mw. Jika tidak maksimal perbaikan kinerja pembangkit eksisting dan tidak adanya pembangunan pembangkit baru di Sumatera Utara maka bisa dibayangkan pertumbuhan sektor listrik tidak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang relatif tinggi.

Pembangunan SHS di desa terpencil juga telah dilakukan pada tahun 2013. Total SHS yang dibangun yaitu sebanyak : 80 unit pada 3 (tiga) kabupaten di Sumatera Utara yaitu :

- a. Kabupaten Langkat : 26 unit
- b. Kabupaten Labuhanbatu Utara : 26 unit
- c. Kabupaten Tapanuli Selatan : 28 unit

Pembangunan di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Potensi/cadangan minyak bumi Sumatera Utara sampai dengan akhir 2014 sebesar 46.431,88 MSTB. Di wilayah Sumatera Utara terdapat 4 kabupaten/kota penghasil minyak dan gas yaitu : Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Padang Lawas, dan Kota Binjai dengan realisasi lifting minyak bumi pada tahun 2013 sebesar 339.120 barel dan pada tahun 2014 sebesar 509.077 barel.

Tabel 3.23
Potensi Minyak Bumi Tahun 2014

KABUPATEN	CADANGAN (MSTB)* MINYAK BUMI		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	19.466	6.884	3.310
DELI SERDANG	7.551	31	27
BINJAI	5.207	0	0
MEDAN	674	686	594
PADANG LAWAS	2.000	0	0
TOTAL	34.898	7.602	3.931

Ket : *MSTB = Million Stock Tank Barrel

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Provsu

Potensi/cadangan gas bumi Sumatera Utara yang terdata sampai dengan akhir 2014 adalah sebesar 556.219 MMSCF (536.2 BCF) yang terdiri dari potensi/cadangan terbukti sebesar 472.399 MMSCF, potensi/cadangan mungkin sebesar 56.478 MMSCF dan potensi/cadangan harapan sebesar 27.342 MMSCF.

Tabel 3.24
Potensi Gas Bumi Tahun 2014

KABUPATEN	CADANGAN (MMSCF)* GAS		
	TERBUKTI	MUNGKIN	HARAPAN
LANGKAT	233.591	54.797	25.893
DELI SERDANG	143.065	0	0
BINJAI	37.810	0	0
MEDAN	3.933	1.681	1.449
OFFSHORE MEDAN - LANGKAT	54.000	0	0
TOTAL	472.399	56.478	27.342

Ket : *MMSCF = Million Standart Cubic Feet / Juta Kaki Kubik

Sumber : Dinas Pertambangan Dan Energi Provsu

5. Urusan Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2013 adalah 21.58% dan tahun 2014 sebedar 21,18%. pertumbuhan industri besar dan sedang di Sumatera Utara tahun 2013 dan tahun 2014 adalah 4,85% dan 5,38%, sedangkan pertumbuhan industri mikro dan kecil tahun 2013 dan tahun 2014 adalah 3,38 % dan 3,49%.

6. Urusan Perdagangan

Komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara pada tahun 2014 adalah *Crude Palm Oil (CPO)*, karet, kakao, kopi dan alumunium. volume ekspor Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah 9.275.891 ton dan pada tahun 2014 sebesar 9.087.526 ton. Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah US\$ 9.598.008.000 dan pada tahun 2014 sebesar US\$ 9.361.110.000.

Volume impor Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah 6.949.116 ton dan pada tahun 2014 sebesar 7.391.305 ton. Nilai import Sumatera Utara tahun 2013 dan tahun 2014 (dalam US\$) adalah 5.108.512.000 dan 5.046.514.000. surplus/minus neraca perdagangan internasional tahun 2013 dan tahun 2014 (dalam US\$) adalah surplus sebesar 4.489.497.000 dan 4.314.598.000

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan pada prinsipnya adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau kota, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperbantukan, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada pemerintahan yang menugaskan.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat, mengingat terbatasnya perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan ini pendanaannya ditampung dalam APBN yang dilaksanakan oleh SKPD yang menerima penugasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui penugasan yang diberikan oleh kementerian teknis.

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah melalui kementerian teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dan jumlah anggaran :
 - a. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.421.447.000,- dan realisasi sebesar Rp. 12.019.102.800,- atau 73,19%.

- b. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 85.509.824.000,- dan realisasi sebesar Rp. 76.120.758.150,- atau 89,02 %.
 - c. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.275.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.996.046.200,- atau 93,47 %.
2. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dan jumlah anggaran :
- a. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.518.639.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.177.907.299,- atau 96,42 %.
 - b. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.044.400.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.927.584.500,- atau 94,28 %.
 - c. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.945.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.924.050.000,- atau 99,56 %.
3. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara Dengan Sumber Dan Jumlah Anggaran:
- a. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.218.341.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.835.538.600,- atau 96,59 %.

- b. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.275.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.660.065.200,- atau 72,97 %.
 - c. Sumber anggaran berasal dari APBN Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 161.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 157.400.000,- atau 97,76 %.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dan jumlah anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.577.435.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.473.348.700 atau 97,09 %.
 5. Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dan jumlah anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.136.277.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.087.729.000,- atau 98,82 %.
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dengan sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.115.064.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 981.225.000,- atau 88 %.
 7. Badan Ketahanan Pangan dengan sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.479.428.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.186.974.570,- atau 97,20 %.
 8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara dengan sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.192.541.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.22.945.180.190,- atau 98,93 %.

9. Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dengan sumber anggaran berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.58.408.886.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.390.814.000,- atau 99,97 %.
10. Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara dengan sumber anggaran berasal dari APBN sebesar Rp. 10.716.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.425.509.000,- atau 78,62 %.
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan sumber anggaran berasal dari APBN sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.913.822.500,- atau 95,69 %.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas Kepala Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota diluar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Kerjasama Antar Daerah.
2. Kerjasama Luar Negeri.
3. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
4. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.
5. Pembinaan Batas Wilayah.
6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
7. Pengelolaan Kawasan Khusus.
8. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Dasar Hukum Kebijakan

Kerjasama Antar Daerah (KSAD) adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/ walikota dengan bupati/walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia, menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar

daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal ataupun daerah yang memiliki keterbatasan. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani anggaran pendapatan dan belanja negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Yang menjadi landasan atau dasar hukum pelaksanaan kerjasama antar daerah adalah :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.

Konsep desentralisasi dari otonomi daerah diartikan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dipahami juga bagaimana pemerintahan daerah menata urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, suatu daerah dapat mengembangkan kegiatan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan pelayanan publik. Pertimbangan berikutnya adalah rencana kegiatan kerjasama yang dilakukan harus mampu menciptakan suatu sinergi dan prinsip saling menguntungkan (*mutual beneficiary*) bagi pihak yang bekerja sama. Disamping itu pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan demi pertimbangan efisiensi pembiayaan kegiatan, daerah wajib mengelolanya secara bersama-sama dengan daerah sekitarnya.

Kerjasama antar daerah di Provinsi Sumatera Utara semaksimal mungkin diupayakan untuk dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama berikut :

- a. Transparan.
- b. Akuntabel.
- c. Partisipatif.
- d. Saling menguntungkan dan memajukan.
- e. Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum.
- f. Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan.

- g. Keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
- h. Kepastian hukum.
- i. Tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses kerjasama daerah di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

- a. Pertemuan awal beberapa kepala daerah.
- b. Studi kelayakan.
- c. Negosiasi substansi yang akan dikerjasamakan.
- d. Penandatanganan keputusan bersama/MoU/perjanjian kerjasama.
- e. Penyusunan *Master Plan/Action Plan*.
- f. Operasionalisasi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kerjasama antar daerah dengan beberapa daerah provinsi maupun kabupaten/kota melalui penandatanganan kesepakatan bersama, yang meliputi :

- a. Kesepakatan Bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentang Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/ Bus Rapid Transit di Wilayah Perkotaan Medan, Binjai, dan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ditandatangani tanggal 5 Mei 2014 bertempat di Medan.

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi : kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan/Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah perkotaan Mebidang Provinsi Sumatera Utara.

- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Perhubungan) dengan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Karo tentang Pembentukan Kelembagaan Badan Kerjasama Pengelolaan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2014 di Medan.

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembentukan kelembagaan Badan Kerjasama Pengelolaan Perkotaan Medan, Binjai, dan Karo. Ruang lingkup meliputi kerjasama dalam bidang :

- 1) Struktur kelembagaan;
- 2) Kewenangan kelembagaan;
- 3) Mekanisme koordinasi;
- 4) Pendanaan kelembagaan.

- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Phakpak Bharat tentang Kerjasama Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara ditandatangani tanggal 15 Desember 2014 bertempat di Medan.

Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mencapai kinerja di bidang pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di provinsi Sumatera utara.

Tujuan dari kesepakatan bersama adalah dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak melalui pemenuhan hak-hak anak agar hidup, tumbuh dan berkembang, ruang lingkup meliputi :

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan hak anak (puha), pemenuhan hak dan perlindungan anak di kabupaten/kota layak anak.
- 2) Menerapkan pelaksanaan puha mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam berbagai bidang pembangunan daerah.
- 3) Melaksanakan penyusunan data anak.
- 4) Melaksanakan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 5) Melaksanakan sosialisasi advokasi, pelatihan, komunikasi informasi dan edukasi terkait pembangunan dan perlindungan anak di kabupaten/kota.

B. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama luar negeri atau kerjasama *sister province* adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada ikatan formal antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi atau pemerintah setingkat di luar negeri, diawali dengan penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* ataupun *Memorandum of Understanding (MoU)*

oleh kedua belah pihak, untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Kebijakan Kegiatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai kegiatan kerjasama luar negeri dengan dilandasi kepentingan untuk pemberdayaan dan promosi ekonomi di luar negeri, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya akselerasi pembangunan di Sumatera Utara, melalui kegiatan :

Mendukung Program Visit IMT-GT 2014

Pembentukan kerjasama segitiga pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand Atau *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan tindak lanjut dan pengembangan kerjasama di antara pengusaha-pengusaha swasta dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang telah mempunyai hubungan historis karena posisi wilayahnya yang berdekatan. Kerjasama IMT-GT sendiri sudah bermula sejak tahun 1991 dan diresmikan dalam pertemuan di Langkawi pada bulan Juli 1993.

Untuk lebih mengenal tentang kerjasama IMT-GT ini dapat disampaikan beberapa hal menyangkut keberadaan kerjasama ini dan manfaat yang telah diperoleh sejak berdirinya di tahun 1993.

a. Institusi utama IMT-GT terdiri dari :

- 1) *Leaders 'summit* (pertemuan sidang pemimpin/kepala negara).
- 2) Ministerial Meeting (Pertemuan Tingkat Menteri)
- 3) Senior Official Meeting (Pertemuan Pejabat Senior)

- 4) *Working Groups* (Kelompok Kerja)
- 5) Pusat Kerjasama Subregional Imt-Gt (Cimt)
- 6) Sekretariat Nasional
- 7) *Join Business Council* (Dewan Bisnis Bersama)
- 8) *Governor's Forum* (Forum Gubernur)

b. Manfaat yang telah diperoleh dari kerjasama IMT-GT :

Dari serangkaian kerjasama yang telah dilaksanakan, beberapa kesepakatan telah melahirkan proyek kerjasama antara 3 (tiga) negara anggota IMT-GT. Hal-hal yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya antara lain :

- 1) Kebijakan Penghapusan Biaya Fiskal
Dengan pembebasan '*exit tax*' oleh indonesia, terjadi mobilitas penduduk *intra-regional* terutama para pedagang, wisatawan, dan pelajar sangat berkembang, dan lebih banyak orang indonesia mendapatkan pekerjaan di industri Malaysia.
- 2) Transportasi udara.
Sekarang ini ada 6 maskapai penerbangan yang beroperasi ke berbagai tujuan di dalam wilayah IMT-GT dengan puluhan kali jadwal penerbangan.
- 3) Peningkatan investasi di berbagai lapangan usaha.
Beberapa hasil yang telah dapat dilihat manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dan daerah lain di kawasan IMT-GT antara lain :

- Peningkatan jumlah hotel yang signifikan di kota Medan, Hat Yai dan Sadao, kota ini sebagai tujuan utama untuk wisatawan intra-regional dan wisatawan.
- Peningkatan operator udara *sub-regional* yang melayani Penang, Kuala Lumpur, Malaka, Langkawi, Ipoh, Pekanbaru, Batam, Medan, Aceh, Dan Songhkla. JBC dibawah fasilitasi, firefly telah memulai operasi ke Sumatera sejak oktober 2008 yang menerbangi rute Penang-Banda Aceh, Penang-Medan dan Sabang-Pekanbaru.
- Bagian dari jembatan Trans – Malaysia – Thailand juga telah dirancang, dengan kerja sama antara petronas dan *petroleum authority of Indonesia* membangun pipa gas dari Kedah (Langkawi) untuk Soghkla.
- Juga telah dilakukan kerjasama dalam bidang telekomunikasi berupa pemasangan kabel serat optik bawah laut antara semenanjung Malaysia dan Sumatera dengan kerjasama erat antara Indosat (Indonesia) dan Telkom Malaysia bhd.
- Telah dibangun juga *the IMT-GT plaza*, yang menampilkan produk-produk lokal indonesia di Trans- Thailand, dan beberapa lokasi lain di sekitar IMT-GT seperti Bukit Kayu Hitam, Port Dickson, Port Klang, Penang dan Selangor di Malaysia, Dumai, Pekanbaru, Batam, Medan dan Tanjungbalai di Indonesia, Hat Yai dan Krabi di Thailand.
- Selain itu terdapat 15 perusahaan kecil tradisional (UMKM) dari penghasil makanan dan minuman produk Malaysia yang telah siap melakukan kerjasama perdagangan dengan pengusaha dari Indonesia.

4) Transportasi air.

Kerjasama ini memberi kesempatan yang luas untuk kelancaran arus lalu lintas manusia dan barang melalui rute Dumai (Indonesia)-Melaka (Malaysia) dan sedang diprogramkan rute Penang–Lhokseumawe (Aceh).

5) Peningkatan Sumber Daya Manusia

Manfaat dari investasi dibidang sumber daya manusia telah dilatih diberbagai bidang, seperti perawat, konstruksi, pertanian, jasa professional dan bidang lainnya.

6) IMT-GT merupakan pasar potensial.

C. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan Kegiatan

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan berbagai pihak dalam menyelaraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi daerah serta peningkatan/pertukaran pengetahuan maupun teknologi dalam rangka meningkatkan perbaikan ekonomi masyarakat serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kesepakatan bersama dengan pihak ketiga/kelembagaan, antara lain :

- a. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI tentang dekonsentrasi untuk program penanggulangan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2014.
- b. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Bahan Ketahanan Pangan Provsu) dengan Kodam I/Bukit Barisan tentang kerjasama dibidang ketahanan pangan dalam mewujudkan peningkatan produksi dan daya saing, yang ditandatangani pada 27 Januari 2014.
- c. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Dinas Kesehatan Provsu) dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang kerjasama dalam penanganan medis terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi tahanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajarannya (Polres/Polsek) yang timbul akibat tindakan kepolisian, penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan jajarannya, yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2014.
- d. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Biro Keuangan) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara tentang kerjasama pengumpulan data dan informasi perpajakan yang ditandatangani pada tanggal 18 Maret 2014.
- e. Kesepakatan bersama antara Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Bank Sumut tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara online di PT. Bank

Sumut dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah tanggal 24 Maret 2014.

- f. Perjanjian kerjasama Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Biro Perekonomian SetdaprovSU) dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2014.
- g. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Balitbang Provsu) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang penguatan jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2014.
- h. Kesepakatan bersama antara Badan Penanaman Modal dan Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sumatera Utara tentang Kerjasama Pengelolaan Galeri Promosi Investasi Dan Kerajinan Daerah Provinsi Sumatera Utara di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang ditandatangani pada tanggal 19 september 2014.
- i. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sekretariat Korpri Provsu) dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tentang kerjasama pelatihan dan pengembangan kewirausahaan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2014.

- j. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sekretariat Korpri Provsu) dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk tentang kerjasama pelatihan dan pengembangan kewirausahaan kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2014.

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan bersama, sehingga jamaah haji merasa tenang, nyaman ke tanah suci dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Kemudian pelaksanaan ibadah haji juga sudah tersistem, sehingga jumlah jamaah haji yang diberangkatkan setiap tahunnya sudah sesuai dengan kuota. Koordinasi penanganan ibadah haji antara instansi daerah dan pusat sangat baik dan harmonis.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji adalah dengan memberikan pelayanan langsung kepada jamaah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan haji merupakan rangkaian kegiatan yang, melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Untuk itu telah dilakukan persiapan-persiapan baik menjelang pemberangkatan maupun pemulangan jamaah haji. Persiapan tersebut diantaranya persiapan fisik Asrama Haji Medan.

Realisasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan haji embarkasi Medan pada tahun 2014, jumlah jamaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi Medan sebanyak : 6.545 orang dengan jumlah petugas sebanyak 75 orang, jamaah yang wafat sebanyak 15 orang, 1 orang jamaah haji yang kembali melalui embarkasi Aceh dan 1 orang jamaah sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi, sehingga terjadi perbedaan jumlah jamaah yang berangkat dengan yang pulang.

Tabel 5.1
Statistik Haji Sumatera Utara 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah jamaah
1	2010 M/ 1431 H	8.189 orang
2	2011 M / 1432 H	8.361 orang
3	2012 M / 1433 H	8.217 orang
4	2013 M / 1434 H	6.613 orang
5	2014 M / 1435 H	6.620 orang

Sumber : Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Setdaprovsu

Pada tahun 2014 M/ 1435 H Pemerintah Arab Saudi masih melaksanakan perluasan/rehabilitasi tempat thawaf di Masjidil Haram, sehingga daya tampung tempat thawaf di Masjidil Haram yang semula 48.000,- jamaah menjadi 22.000,- jamaah per satu jam.

Untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan di seputar masjidil haram, pemerintah kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji pada tahun 2014 di seluruh dunia sebesar 20% tanpa kecuali. Dengan demikian kuota jamaah haji Indonesia pada tahun 2014 M / 1435 H menjadi 168.000 orang jamaah, dari semula 211.000 orang jamaah, sehingga kuota haji Provinsi Sumatera Utara yang semula sebanyak 8.234 orang jamaah menjadi 6.588 orang jamaah.

Pengurangan kuota haji ini hanya berlaku sementara sampai proyek perluasan tempat thawaf yang diperkirakan selesai tahun 2016.

E. Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan batas wilayah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan sarana untuk membina kesatuan dan persatuan bangsa dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.

Saat ini NKRI telah memiliki 34 provinsi, 497 kabupaten/kota, dengan segmen batas daerah yang harus ditegaskan adalah 952 segmen (catatan : 1 segmen meliputi 2 kabupaten/kota yang berbatasan). Batas daerah yang telah ditegaskan dan mempunyai kepastian hukum adalah batas daerah yang sudah ditetapkan dengan Kepmendagri/Permendagri dan dilengkapi dengan daftar koordinat di peta yang merupakan lampiran.

Terkait dengan fasilitasi perbatasan ini, telah terbit 107 Permendagri yang meliputi 155 segmen batas yang terdiri dari 29 segmen batas provinsi dan 126 segmen kabupaten/kota.

Di Provinsi Sumatera Utara segmen batas daerah yang harus ditegaskan adalah 73 segmen batas yang terdiri dari 17 segmen batas provinsi (10 segmen batas Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, 3 segmen batas dengan Sumatera Barat, 4 segmen batas dengan Riau) dan 56 segmen kabupaten/kota.

1. Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh
 - a. Panjang batas Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh adalah 373 Km.
 - b. Terdapat 10 segmen batas Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh yaitu :
 - 1) Kabupaten Karo dengan Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 2) Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 3) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Aceh Singkil.
 - 4) Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Aceh Singkil.
 - 5) Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kota Subulussalam.
 - 6) Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 7) Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Gayo Lues.
 - 8) Kabupaten Dairi dengan Kota Subulussalam.
 - 9) Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Aceh Singkil.
 - 10) Kabupaten Langkat Dengan Kabupaten Aceh Tenggara.
 - c. Penataan batas Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh telah dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun antara kedua provinsi mulai tahun 2003.

- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2011 telah memasang pilar batas sebanyak 135 buah tersebar di Kabupaten Langkat, Karo, Pakpak Bharat dan Tapanuli Tengah.

Permasalahan batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh antara lain :

- a. Antara Kabupaten Karo (Desa Law Pakam Kecamatan Mardinding) Dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Kecamatan Babul Makmur).
- b. Antara Kabupaten Langkat (permasalahan terdapat di Kecamatan Besitang penduduk Kabupaten Langkat merambah areal melewati batas daerah (versi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang) dengan Kabupaten Aceh Tamiang.
- c. Antara Kabupaten Langkat (sarang burung walet, pintu masuk berada di Kabupaten Langkat, sedangkan belakang atau ekor sarang burung walet berada di wilayah Provinsi Aceh) dengan Kabupaten Gayo Lues.
- d. Antara Kabupaten Tapanuli Tengah (Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan Dan Pulau Panjang) dengan Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Antara Kabupaten Humbang Hasundutan (masih memerlukan survei diprediksi adalah di areal hutan di Kecamatan Tara Bintang) dengan Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Kedua pemerintah provinsi sepakat menyerahkan keputusan kepada Kementrian Dalam Negeri Cq. Ditjen Pemerintahan Umum, penyelesaian penegasan batas terhadap titik yang belum disepakati untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan koordinasi yang efektif dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Berkala.
 - b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Program-Program Pemerintahan di Daerah.
2. Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
- a. Garis batas wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 236 Km.
 - b. Terdapat 3 segmen batas Provinsi Sumatera Utara dengan Sumatera Barat Yaitu :
 - 1) Kabupaten Mandailing Natal dengan Pasaman Barat.
 - 2) Kabupaten Mandailing Natal dengan Pasaman.
 - 3) Kabupaten Padang Lawas dengan Pasaman.
 - c. Penataan batas kedua provinsi dilaksanakan mulai Tahun 1999.
 - d. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun antara kedua provinsi dengan melakukan pelacakan, pengukuran dan pemasangan pilar batas pada tahun 2005 telah selesai.
 - e. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat peta batas kedua provinsi, dan telah disampaikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan *cross check*, dalam rangka pengajuan Permendagri penetapan batas daerah.

Permasalahan batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- a. Antara Kabupaten Mandailing Natal (Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi) dengan Kabupaten Pasaman (Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao) di jalan Medan Padang.
 - b. Hasil rapat penyelesaian batas antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Mei 2012 telah disiapkan peta digital oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya akan diklarifikasi oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Sumatera Utara bersama Tim PBD Kabupaten Mandailing Natal serta Tim PBD Provinsi Sumatera Barat bersama Tim PBD Kabupaten Pasaman.
 - c. Tindaklanjut sebagaimana diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaporkan hasilnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau
- a. Panjang batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau adalah 307 Km.
 - b. Terdapat 4 segmen batas Provinsi Sumatera Utara dengan Riau Yaitu :
 - 1) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
 - 2) Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Rokan Hilir.
 - 3) Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu.
 - 4) Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Penataan batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau telah dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun antara kedua provinsi mulai tahun 1985.
 - d. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memasang pilar batas antara sebanyak 151 buah tersebar di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan.
 - e. Permasalahan batas Provinsi Sumatera Utara dengan Riau antara lain :
 - 1) Antara Kabupaten Labuhanbatu Selatan (di Kecamatan Torgamba, terletak di pilar nomor 153 di Aek Sindur dengan Kabupaten Rokan Hilir.
 - 2) Antara Kabupaten Padang Lawas (Pada Titik P.49 – P.58 mengikuti batas alam, yaitu Sungai Marubi menuju ke Sungai Teratak Tinggi) dengan Kabupaten Rokan Hulu.
 - f. Progres penyelesaian tata batas Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas) dengan Provinsi Riau (Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu) sampai saat ini belum terlihat langkah konkrit dalam menuntaskan permasalahan batas antara kedua provinsi. Solusi penyelesaian masih diperlukan koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendagri.
4. Permasalahan batas kabupaten/kota di Sumatera Utara
- Terdapat 56 segmen batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Yaitu :
- 1) Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batubara.
 - 2) Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
 - 3) Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai.
 - 4) Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Simalungun.
 - 5) Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir.

- 6) Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat.
- 7) Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun.
- 8) Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang.
- 9) Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi.
- 10) Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Simalungun.
- 11) Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 12) Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 13) Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 14) Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 15) Kabupaten Labuhanbatu selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- 16) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas.
- 17) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 18) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 19) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Toba Samosir.
- 20) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 21) Kabupaten Langkat dengan Kota Binjai.
- 22) Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang.
- 23) Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 24) Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Padang Lawas.
- 25) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

- 26) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas.
- 27) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 28) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kota Padangsidimpuan.
- 29) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 30) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Padang Lawas.
- 31) Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kota Padangsidimpuan.
- 32) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga.
- 33) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 34) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 35) Kota Binjai dengan Kabupaten Deli Serdang.
- 36) Kota Medan dan Deli Serdang.
- 37) Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun.
- 38) Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten Deli Serdang.
- 39) Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi.
- 40) Kabupaten Toba Samosir dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 41) Kota Tebing Tinggi dengan Kabupaten Serdang Bedagai
- 42) Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Toba Samosir.
- 43) Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 44) Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Deli Serdang.
- 45) Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias.
- 46) Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias Barat.
- 47) Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Utara.
- 48) Kabupaten Nias dengan Kabupaten Nias Barat.
- 49) Kabupaten Nias dengan Kota Gunungsitoli.
- 50) Kabupaten Nias Utara dengan Kabupaten Nias Barat.
- 51) Kabupaten Nias Utara dengan Gunungsitoli.
- 52) Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir.

- 53) Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- 54) Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 55) Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- 56) Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi.

Permasalahan batas antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain :

- a. Kabupaten Deli Serdang dengan Serdang Bedagai :
Sudah terbit Permendagri No. 29 tahun 2007 tanggal 27 Juni 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan surat No. 136/2393 tanggal 29 Februari 2008 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang dan Bupati Serdang Bedagai yang isinya untuk menindaklanjuti dan mensosialisasikan Permendagri tersebut kepada masyarakat.
- b. Kabupaten Samosir dengan Humbang Hasundutan :
 - 1) Pada prinsipnya, pemerintah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan siap untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah di lapangan.
 - 2) Tumpang tindih peta dilampiran pembentukan Kabupaten Samosir dan beberapa titik di kawasan hutan TPL (PT. Toba Pulp Lestari), menunggu tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri.

- c. Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga :
- 1) Kegiatan penegasan batas daerah berpedoman pada Undang-Undang Pembentukan Daerah dan Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
 - 2) Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga siap untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah di lapangan.
 - 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap memfasilitasi kegiatan koordinasi antar kabupaten/kota yang akan ditegaskan batasnya dan selanjutnya Ditjen PUM melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah tersebut.
 - 4) Akan diadakan rapat lanjutan yang mengikut sertakan aparat Tim PBD Provinsi, Tim PBD Kabupaten/Kota (atau pejabat lain yang terkait batas daerah) yang berbatasan, Camat dan Kasi Tapem, Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD atau tokoh masyarakat pada wilayah yang berbatasan sebelum dilakukan kegiatan di lapangan.

Dalam menyelesaikan batas administrasi kabupaten/kota, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi 4 (empat) batas administrasi kabupaten dan sedang dalam proses penerbitan peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu :

- a. Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batubara.
- b. Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir.
- d. Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.

5. Permasalahan Batas Provinsi Sumatera Utara dengan negara lain/Perairan laut lepas

Indonesia memiliki 3 lokasi yang berpotensi memerlukan delimitasi batas maritim dengan Malaysia. Di Provinsi Sumatera Utara terindikasi 3 (tiga) pulau terluas yang berpotensi dapat menimbulkan konflik antar negara yang berbatasan jika tidak ditangani secara bersama yaitu :

- a. Pulau Berhala terletak di Kabupaten Serdang Bedagai dengan laut lepas selat malaka dengan luas \pm 44,57 ha. Pulau ini tidak berpenghuni namun terdapat bangunan, mercusuar dan pos jaga milik TNI/Angkatan Laut, Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kelurahan Tj. Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Pulau Simuk Terletak di Kabupaten Nias Selatan berbatasan dengan laut lepas lebih kurang 23,2 Km. Di pulau ini terdapat penduduk 9.750 jiwa, masyarakat hidup tentram dan damai dengan mata pencaharian bertani.
- c. Pulau Wunga terletak di Kabupaten Nias berbatasan dengan laut lepas dengan luas lebih kurang 9 km, berpenghuni tidak tetap dan terdapat mercusuar.

6. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- a. Batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 236 Km telah selesai dilaksanakan meliputi pelacakan, pengukuran dan pemasangan pilar batas, saat ini sedang proses pembuatan pita batas untuk pengusulan ke Menteri Dalam Negeri.

- b. Batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sepanjang 373 Km, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pelacakan, pengukuran dan pemasangan pilar sebanyak 95 patok. Sedangkan untuk batas Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo dengan Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara masih dalam tahap negosiasi.
- c. Batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau sepanjang 460 Km telah dilaksanakan berupa pelacakan, pengukuran dan pemasangan pilar khusus untuk patok 153 di Aek Sindur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, untuk patok 49x/d58 yang berada di kecamatan hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas yang berbatasan dengan Kecamatan Rokan Hilir perlu direkomendasikan kembali.
- d. Dengan Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara masih dalam tahap negosiasi.
- e. Batas Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau sepanjang 460 Km telah dilaksanakan berupa pelacakan, pengukuran dan pemasangan pilar khusus untuk patok 153 di Aek Sindur Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Untuk patok 49x/d58 yang berada di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas yang berbatasan dengan Kecamatan Rokan Hilir perlu direkomendasikan kembali.

7. Penyelesaian Permasalahan

Dalam menyelesaikan permasalahan dan solusi penyelesaian masih di perlukan koordinasi yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan koordinasi yang efektif dengan kabupaten/kota di wilayahnya antara lain :

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkala.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program – program pemerintah di daerah.

Adapun batas administrasi kabupaten/kota, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi 4 batas administrasi kabupaten dan sedang dalam proses penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu :

- a. Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batubara.
- b. Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Toba Samosir.
- d. Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.

F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada umumnya status bencana yang terjadi di Sumatera Utara tahun 2014 masih skala lokal/kabupaten/kota. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan kebencanaan yang cukup tinggi, secara nasional mendapat peringkat II sebagai daerah rawan bencana yang memiliki catatan dan frekuensi kejadian bencana.

Pada Tahun 2014 bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara antara lain sebagai berikut :

Tabel 5.2
Bencana Alam Tahun 2014

No	Jenis Bencana	Jlh Kejadian	Korban Meninggal	Jml Rumah		Fasilitas Umum			Areal Pertanian (ha)
				rb	rr	Sekolah	Jembatan	Jalan	
1	kebakaran	20	4	40	2	-	-	-	-
2	angin puting beliung	5	-	3	60	1	-	-	-
3	tanah longsor	3	-	19	-	-	-	-	-
4	banjir	15	1	25	150	-	-	-	-
5	gempa	-	-	-	-	-	-	-	-
6	gunung meletus	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana yang terjadi antara lain :

- a. Melakukan kaji cepat tentang cakupan lokasi dan dampak bencana.
- b. Melakukan posko pendamping bersama pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkena bencana.
- c. Melakukan koordinasi kepada instansi terkait dalam rangka percepatan kebutuhan korban bencana.
- d. Memfasilitasi kebutuhan korban bencana baik kebutuhan dasar maupun logistik dari instansi terkait.

Dalam rangka mengurangi resiko bencana sebagai akibat dampak kejadian bencana guna melindungi masyarakat terhadap kejadian bencana sebagai salah satu upaya mitigasi kebencanaan, maka untuk menyikapi hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu telah melakukan upaya antisipasi menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di Sumatera Utara antara lain :

- a. Penyebaran informasi daerah-daerah rawan berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor tersebar di Sumatera Utara kepada pemerintah kabupaten/ kota sebagai informasi/peringatan dini bagi daerah untuk pengambilan langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya bencana.
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan identifikasi pada wilayah yang diperkirakan memiliki potensi rawan bencana di kabupaten/kota, khususnya daerah-daerah yang dianggap rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor (berdasarkan informasi BMKG) dan ancaman gunung meletus (berdasarkan informasi PVMBG) dalam rangka kesiapsiagaan.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Peningkatan kapasitas aparatur dan SDM masyarakat tentang kebencanaan dan upaya penyelamatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan dan simulasi.
- e. Menyiapkan pendataan potensi satuan relawan bencana untuk disertifikasikan menjadi relawan bencana yang diprakarsai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- f. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mitigasi, kesiapsiagaan dan SAR antara lain dengan badan Geologi/PVMBG, BMKG wilayah I Medan dan Kantor SAR I Medan.
- g. Membuat perencanaan daerah rawan bencana yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang wilayah kabupaten, rencana kontijensi dan jalur evakuasi dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Daerah Sumatera Utara merupakan wilayah yang berpotensi rawan bencana yang cukup tinggi, secara nasional Provinsi Sumatera Utara menduduki ranking/peringkat II sebagai daerah rawan bencana

berdasar kondisi morfologi dan catatan/ frekuensi kejadian bencana yang terjadi.

G. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah

Kawasan ekonomi khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK terdiri atas satu atau beberapa zona:

- a. Pengolahan Ekspor;
- b. Logistik;
- c. Industri;
- d. Pengembangan teknologi;
- e. Pariwisata;
- f. Energi; dan
- g. Ekonomi lain.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2012 tentang kawasan ekonomi Khusus Sei Mangkei, maka secara resmi berdiri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang berbatasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Keramat Kuba, Kecamatan Bandar Perdagangan.
- b. Sebelah Selatan : PTPN IV Kebun Mayang.

- c. Sebelah Timur : PTPN IV Kebun Gunung Bayu.
- d. Sebelah Barat : Sungai Bah Bolon.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 pada pasal 12 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Tahun 2014 merupakan tahun kedua sejak ditetapkannya pada Februari 2012. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan terkait perkembangan Kek Sei Mangkei adalah :

- a. KEK Sei Mangkei ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 pada Februari 2012, dan sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009, KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, yaitu Februari 2015.
- b. Di dalam kawasan sendiri sedang dilaksanakan :
 - 1) Pembangunan infrastruktur dasar
 - pembangunan gedung kantor
 - pembangunan *water intake and water treatment plant*
 - pembangunan beberapa jalan di dalam kawasan
 - pembangunan saluran induk, jaringan listrik, fasilitas TI, dan perumahan
 - 2) Pembangunan fasilitas industri dasar
 - pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas 75 ton TBS/jam.
 - pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBS) 2 x 3,5 mw.
 - pembangunan pabrik palm kernel oil (PKO) dengan kapasitas 400 ton/hari.

- 3) Pembangunan pusat inovasi kelapa sawit dengan pendanaan dari DIPA Kementerian Perindustrian RI.
- c. Untuk mendukung persiapan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei hal-hal yang harus dipersiapkan : Secara keseluruhan infrastruktur dikawasan untuk tahap I, meliputi air bersih dan jaringannya, telekomunikasi, drainase, listrik dan jaringannya, pintu gerbang, fasilitas keamanan, jalan sementara, IPAL sementara dan sarana administrator sudah selesai. Sedangkan untuk infrastruktur lain seperti kereta api yang berada di dalam kawasan sepanjang 2,95 km dari kawasan menuju stasiun perlanaan saat ini progresnya masih dalam proses review design dokumen oleh konsultan dan BPKP Sumatera Utara.

H. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Tahun 2014 jumlah unjuk rasa di kantor Gubsu sebanyak 123 kali yang dilakukan elemen masyarakat ormas, LSM atau organisasi kemahasiswaan, gangguan yang terjadi antara lain gangguan yang berbasis anarkisme sebanyak 3 kali, yaitu :

- a. Tanggal 1 Oktober 2014, Pukul : 11.45 s/d 13.15 Wib
Kelompok elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Sumut Bersih Anti Korupsi (ASBAK). Koordinator Ibrahim Simanjuntak, dengan melakukan pembakaran ban bekas pada pintu gerbang dan pengrusakan sehingga tidak dapat difungsikan.

- b. Tanggal 24 November 2014, Pukul : 12.00 s/d 15.30 Wib
Kelompok elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komite Tani Menggugat (KTM) Sumatera Utara. Koordinator Batao Simanjuntak, Front Perjuangan Rakyat SU (KTM) Sei Mencirim-GSBI SU-FMN cabang Medan, dengan melakukan pengrusakan pintu gerbang sehingga tidak dapat difungsikan.
- c. Tanggal 10 Desember 2014, Pukul. 09.45 s/d 14.00 Wib
Kelompok elemen masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Buruh Sumatera Utara (KSB) : GSBI-KSPI-FSPMI-KGB PETA-FMN Medan. Koordinator Minggu Saragih, dengan melakukan pengrusakan pintu gerbang sehingga tidak dapat difungsikan.

Dari hasil rapat maupun monitoring yang dilaksanakan pada tahun 2014 oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama instansi terkait dapat dijelaskan bahwa ada beberapa konflik yang terjadi seperti :

- a. Konflik horizontal terkait dengan penambangan emas tanpa izin (Peti) di wilayah Kontrak Karya (KK) PT Sorikmas Mining.
- b. Konflik pendirian masjid Al- Munawarrah di Tapanuli Utara.
- c. Konflik pendirian gereja HKBP di Binjai Baru, Kota Binjai.
- d. Konflik sosial berlatar belakang lahan / SDA, mulai tahun 2014.
- e. Konflik sosial bernuansa Sara, periode mulai tahun 2014.
- f. Konflik sosial berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi mulai tahun 2014.
- g. Konflik sosial berlatar belakang industri mulai Tahun 2014.

BAB VI

PENUTUP

Tahun 2014 merupakan tahun pertama melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera” yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap III dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2013 – 2018 yang mengarahkan kebijakan pembangunan Sumatera Utara dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, pembangunan index demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilindungi nilai-nilai moral dan etika, serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.

Dalam proses pembangunan di Sumatera Utara baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta telah memberikan perkembangan ekonomi yang positif hingga melampaui capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional, sebagai konsekuensi pengoptimalan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Struktur ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2014 didominasi dari lapangan usaha pertanian, diikuti dengan lapangan usaha kehutanan, perikanan dan industri pengolahan, hal ini menunjukkan pengelolaan potensi yang dimiliki Sumatera Utara semakin optimal.

Tahun 2014 pencapaian kinerja pendidikan terus membaik dilihat dari beberapa indikator yang meningkat, salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan ini adalah melalui peningkatan kualitas dan potensi guru untuk memiliki ijazah D-4 maupun S-1 serta pembangunan ruang kelas baru untuk memenuhi fasilitas proses belajar mengajar yang memenuhi standar.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, serta ketersediaan obat.

Pengelolaan komoditi unggulan Sumatera Utara terus mengalami peningkatan seperti pengelolaan kelapa sawit dan produk turunannya, demikian juga dengan sektor perikanan baik hasil tangkapan maupun budidaya. Sedangkan pengelolaan sektor pertanian terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk melalui produksi beras Sumatera Utara yang telah mampu memperoleh skor swasembada.

Disamping pencapaian kinerja yang membaik, disisi lain kita terus melakukan kerja keras untuk membangun infrastruktur seperti penyediaan energi listrik dan gas, pembangunan infrastruktur jalan baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten/kota khususnya yang memfasilitasi ke sentra produksi dengan harapan untuk menekan biaya produksi demi meningkatkan daya saing produk Sumatera Utara, disamping itu kita juga terus berupaya untuk percepatan kawasan ekonomi khusus untuk menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2014 merupakan upaya kerja keras semua pihak baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun unsur legislative serta instansi vertikal yang juga tidak kalah pentingnya peran swasta. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungan dalam proses pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik, kedepan dukungan ini terus diharapkan demi mewujudkan visi "Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera".

Akhirnya kami berharap semua pihak dapat terus memberikan masukan serta saran yang konstruktif guna kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara, oleh karena itu tanggapan dan saran dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan atau melalui surat elektronik ke alamat biro_otda@sumutprov.go.id

Demikian laporan keterangan pertanggungjawaban ini disampaikan, semoga Allah Swt. Tuhan yang maha kuasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua.

Sekian dan terimakasih.


GUBERNUR SUMATERA UTARA
H. GATOT PUJO NUGROHO, ST, M.Si